

PENBARUAN TANI



M I M B A R K O M U N I K A S I P E T A N I

Dok. <http://www.spaceimaging.com/>



TSUNAMI PERSATUKAN KAUM TANI

wawasan

Tsunami: Sebuah Jalan
Bagi Mbdal

Baca selanjutnya di hal.

6

agraria

Membangun Kedaulatan Pangan
Di Daerah Bencana

Baca selanjutnya di hal.

11

kabar tani

KSKBA: Gerakan Kemanusiaan Untuk
Aceh dan Sumut

Baca selanjutnya di hal.

12-13

Gempa Dan Tsunami, Menjadi Peringatan dan Mempersatukan Kita

Selamat tahun baru 2005, walau tahun ini disambut dengan kesedihan akibat bencana yang maha dahsyat di Aceh dan Sumatera Utara segenap redaksi pembaruan tani mempersembahkan perubahan dan cara penyajian berita, opini dan informasi kepada kawan-kawan semua.

Saudaraku sekalian, mari kita tundukkan kepala dan berdoa sesaat bagi saudara, kawan dan sahabat-sahabat kita di Sumatera Utara dan Aceh. Doa kita bagi mereka hanya satu cara meringankan beban derita yang begitu dasyat. Dalam sekejap mata ribuan orang meninggal dunia, peternakan hancur, nelayan-nelayan tak kuasa menahan gelombang tsunami, pertanian-pertanian banyak rusak. Tahun ini di tutup oleh kesedihan mendalam sekali bagi kita sebagai bangsa Indonesia, bagi warga Asia juga bagi dunia.

Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, sekitar pukul 08.00 WIB itu, dengan kekuatan 8,9 skala richter, yang diikuti oleh gelombang Tsunami, yang melanda berbagai negara, telah menyebabkan timbulnya korban manusia yang sangat besar dan kerusakan yang sangat parah, khususnya di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Indonesia. Menurut Koalisi Solidaritas Kemanusiaan Bencana Aceh-SUMUT (KSKBA) data per tanggal 27 Januari 2005, yang diperoleh dari berbagai sumber, bencana alam ini telah menyebabkan meninggalnya 100.258 orang, hilang 136.700 orang, dan mengungsi sebanyak 447.139 orang. Sedangkan data per tanggal 18 Pebruari 2005, korban meninggal sebanyak 120.903 orang, hilang 166.368, dan mengungsi sebanyak 446.807 orang. Disamping itu gempa bumi dan tsunami ini juga telah menghancurkan rumah penduduk, dan merusak alat produksi petani dan nelayan, dan masyarakat lainnya dalam jumlah yang sangat besar. Belum lagi kerusakan-kerusakan di negara-negara asia lainnya seperti thailand, srilanka, India, serta afrika. Begitu besarnya tsunami ini hingga meluluhlantakan apapun.

Kawan kita di Persatuan masyarakat Tani Aceh (PERMATA) walaupun pengurus propinsinya di Banda Aceh selamat semua, namun tak ayal sekretariatnya hancur, menyisakan trauma yang mendalam. Juga beberapa anggota PERMATA banyak yang hilang hingga saat ini.

Dalam situasi ini, tetap saja kita waspada atas bantuan-bantuan yang sifatnya justru "menjajah". Sebagai bangsa yang berdaulat kita harus tegakkan kehormatan dan harga diri bangsa. Kita lihat tentara-tentara asing, LSM asing dan berbagai lembaga donor seandainya keluar masuk Aceh, bencana dikawatirkan menjadi komoditas politik dan ekonomi. Hal ini sudah menggejala, seperti bantuan dari WFP yang telah mendistribusikan 4.200 ton beras, biskuit serta mie fortifikasi merupakan tindakan yang tidak bijak. Mengapa? Walau kita terkena bencana peraturan sebagai negara merdeka tak bisa dilabrak begitu saja oleh lembaga Internasional, karena sampai saat ini kita melarang import beras. Walau alasan kemanusiaan dan emergency tak bisa dibenarkan begitu saja, karena di Indonesia masih surplus beras. Beli saja dari petani, jangan bawa dari luar Indonesia.

Kita menyadari bahwa waspada itu perlu namun tak berlebihan, bencana tsunami dan gempa cukup sudah, jangan lagi ditambahi dengan "penjajahan" baru berupa ekonomi, dan politik (ay).

tanggap

Keluarga Besar FSPI Turut Berduka atas Bencana Gempa dan Tsunami

Saya, Mugi Ramanu ketua MPTP FSPI, melalui surat ini atas nama Keluarga Besar Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), berduka cita atas kejadian gempa dan tsunami di Aceh dan Nias serta di beberapa negara lainnya di Asia-Afrika. Duka kita semua begitu tertoreh di sanubari, semoga saja Allah SWT, memberikan tempat yang layak bagi saudara-saudara kita yang meninggal dan memberikan kekuatan bagi yang ditinggalkan dan menjadi korban.

Kami juga menyerukan bagi masyarakat luas untuk bertindak cepat dan sigap membantu masyarakat aceh/Nias, serta bagi pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan yang sesegera mungkin mengatasi persoalan ini dan khususnya bagi anggota FSPI diserukan untuk mengirimkan bantuan tenaga, makanan, minuman serta donasi secepat mungkin pada tahap darurat ini dengan tetap mempertahankan kaidah-kaidah perjuangan kita.salam.

Mugi Ramanu
Ketua MPTP FSPI

Doa untuk Aceh dan Nias

Di akhir desember kita diperingatkan oleh Alam, untuk menghentikan segala kekerasan, kerakusan di nusantara ini. Duka mendalam dan memilukan bagi saudara kita di aceh dan nias terasa hingga ke dalam tidur malam kita. Ya Allah, cukupkan cobaanmu pada hamba-hamba yang tak berdaya ini. Ya Allah, kami coba mengambil hikmah dari cobaanMU, kami bertafakur dan sujud hanya kepadaMU. Ampuni kami yang kadang lalai menjalankan perintahMU. Semoga Engkau yang Maha Tahu, Maha Bijaksana dapat memberikan kekuatan Iman dan daya upaya bagi kami untuk bangkit kembali. Ya Allah, jauhkan kami dari segala Bencana.

Zubaidah
Anggota DPP Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU)

(Surat serupa juga banyak diterima oleh Redaksi)

DITERBITKAN OLEH
FEDERASI SERIKAT PETANI INDONESIA (FSPI)

DICETAK OLEH
PETANI PRESS

PENANGGUNG JAWAB
HENRY SARAGIH

PEMIMPIN REDAKSI
ACHMAD YA'KUB

SEKRETARIS REDAKSI
TITA RIANA ZEN

SIDANG REDAKSI
INDRA SAKTI LUBIS
AGUS RULI ARDIANSYAH
IRMA YANNY
ALI FAHMI
WILDA TARIGAN
CECEP RISNANDAR

ARTISTIK DAN TATA LETAK
MUHAMMAD IKHWAN

SIRKULASI
SRIWAHYUNI

ALAMAT REDAKSI
JL MAMPANG PRAPATAN XIV NO.5
JAKARTA 12790
TELP: +62 21 7991890
FAX: +62 21 7993426
EMAIL: pembaruantani@fspi.or.id
www.fspi.or.id

PEMBARUAN TANI terbit setiap dua bulan sekali sebagai media pendidikan, informasi bagi rakyat petani, juga sebagai mimbar komunikasi petani. PEMBARUAN TANI bukan sekedar media informasi saja, tetapi merupakan media perjuangan bagi buruh tani dan petani di Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap neokolonialisme dan imperialisme. Tujuan utama dari penerbitan PEMBARUAN TANI adalah untuk semakin memperkuat gerakan rakyat tani dalam perjuangan mewujudkan pembaruan agraria sejati.

Redaksi menerima sumbangan artikel, opini atau tulisan mengenai pertanian/agraria/perjuangan yang sesuai dengan visi dan misi tabloid PEMBARUAN TANI. Setiap tulisan yang dikirimkan ke redaksi diketik ±1000 (seribu) kata dan dikirimkan lewat pos, fax, maupun email. Apabila tulisan dimuat, anda akan menerima pemberitahuan dari redaksi.

Wartawan PEMBARUAN TANI dilengkapi tanda pengenal dan tidak meminta/menerima apapun dari narasumber



classroomclipart.com

KABAR UTAMA:
TSUNAMI DAN PETANI

35

WAWASAN TSUNAMI, SEBUAH JALAN
BAGI MODAL

6

NASIONAL SERAMBI MEKKAH:
NEGERI SERIBU BENDERA?

89

INTERNASIONAL WTO KELUAR
DARI PERTANIAN!

10

AGRARIA MEMBANGUN KEDAULATAN
DI DAERAH BENCANA

11

KABAR TANI WAWANCARA:
KSKBA (Koalisi Solidaritas Kemanusiaan
untuk Bencana Alam)

12-13

PETANI PEREMPUAN BIAS JENDER DALAM
BANTUAN TSUNAMI

14

INFO PRAKTIS BIODIGESTER:
SUMBER ENERGI DARI KOTORAN TERNAK

15

SERIKAT UPAYA PERMATA ATASI
KRISIS PANGAN PASKA
TSUNAMI

16

Tsunami... Persatukan Kaum Tani dan Nelayan

Minggu, 26 Desember 2004, benturan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Asia Tenggara menimbulkan guncangan yang luar biasa besarnya. Gempa bumi 8,7 skala richter menggoyang serambi mekah. Beberapa saat setelahnya alam menunjukkan tanda-tanda lain, air laut surut sampai ratusan meter, ikan-ikan berkelepak di hamparan pasir, burung-burung camar putih berarakan menuju ke pedalaman. Sebuah fenomena yang janggal.

Sayangnya tidak banyak yang mengerti dengan pertanda alam itu. Malah sebagian orang beramai-ramai ke pantai ingin tahu apa yang sedang terjadi. Hingga pada suatu saat, air laut yang tadinya surut, menggenangi begitu tinggi dan berbalik menerjang pantai. Fenomena alam ini dikenal dengan nama "tsunami", sebuah istilah dalam bahasa Jepang. Kedahsyatan tsunami itu tidak hanya dirasakan di Aceh dan Sumatera Utara. Gelombangnya terus bergerak menyapu negara-negara di sekitar lautan Hindia yang meliputi Thailand, Malaysia, India, Srilanka, Maladewa, dan negara-negara di Afrika Timur. Tak heran bila dunia mencatatnya sebagai bencana paling besar abad ini.

Seperti diberitakan banyak media, gempa dan tsunami tersebut diperkirakan menelan korban jiwa sebanyak 166.520 orang di Aceh dan 240 orang di Nias, belum lagi jumlah orang yang hilang akan terus bertambah. Kerusakan terparah dialami Meulaboh, kota yang terletak di pantai barat pulau Sumatera ini nyaris seluruh infrastruktur fisiknya hancur total. Di kota tersebut jumlah korban mencapai 80.251 orang. Kota-kota lain di propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang mengalami kerusakan signifikan diantaranya, Krueng, Bireun, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Lhokseumawe, Sabang, Nagan Raya, Aceh Jaya, Calang, Aceh Besar, Simeulue, Pulau Aceh, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Aceh Tengah. Ditambah pulau Nias di Sumatra Utara.

Kerusakan serius melanda lahan-lahan pertanian dan

perikanan laut. Dimana 25.000 hektar hutan mangrove, 29.000 hektar terumbu karang, dan 120 hektar lahan rumput laut hilang. Kehilangan itu membuat aktivitas ekonomi di bidang perikanan laut hancur. Sebagai gambaran, di Kabupaten Aceh Barat, Meulaboh, pertanian menjadi pilar utama perekonomiannya yang meliputi tanaman pangan dan buah-buahan, tanaman perkebunan, dan perikanan laut. Sektor itu memberikan kontribusi sebesar 65% dari total perekonomiannya.

Berdasarkan laporan International Labour Organization (ILO), kerusakan akibat tsunami di Aceh menyebabkan 600.000 orang kehilangan pekerjaannya. Angka pengangguran naik drastis dari 6,8% menjadi 30%. Dari sekian banyak orang yang kehilangan pekerjaan, jumlah paling besar di dominasi oleh nelayan, petani, usaha kecil dan sektor informal lainnya. Tentu saja ini menjadi sangat mengkhawatirkan bila tidak cepat ditangani, karena berpotensi menjadi kerawanan sosial.

Bantuan Berdatangan

Bencana ini tak urung mengundang pihak lain untuk memberi bantuan. World Bank, ADB dan CGI tercatat menjanjikan donor pinjaman. Bantuan lain yang berupa pangan mengalir dari lembaga seperti World Food Programme (WFP), yang langsung mendatangkan 4.200 ton beras, 500 ton ikan kalengan (diimpor dari Thailand), berbagai mie dan biskuit. Makanan itu di sebar ke seluruh penjuru Aceh. Mereka memperkirakan 300 ribu orang kekuarangan bahan pangan dan jumlah itu akan terus membengkak hingga mencapai angka 500 ribu orang. Food and Agriculture Organization (FAO), sebuah badan yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan akan memfokuskan bantuan untuk menstimulir kegiatan

classroomclipart.com



Hancur, Lahan pertanian dan perikanan di sebagian besar propinsi NAD diterjang oleh tsunami. Hal ini butuh perhatian dan kerja keras dari pemerintah, dan rakyat. Termasuk juga kaum tani.

sosial ekonomi keluarga nelayan yang banyak menjadi korban tsunami. Selain itu FAO akan mendistribusikan benih, pakan ternak, pupuk, bibit ternak, dan vaksin untuk membantu para petani. FAO juga menjanjikan bantuan sebesar US\$ 10 juta. Ditambah lagi US\$ 26,5 juta dari negara-negara anggota PBB, untuk membantu program finansial pertanian dan perikanan di negara-negara yang terkena tsunami selama enam bulan ini. Dan mengusahakan beberapa milyar dolar Amerika lagi untuk membangun kembali pertanian dan perikanan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Banyak motif yang melatarbelakangi bantuan besar-besaran tersebut. Mulai dari solidaritas kemanusiaan sampai dengan motif-motif ekonomi. Dalam hal pangan, bantuan didatangkan secara impor. Pada gilirannya, bantuan pangan tersebut mengacaukan stok pangan petani lokal. Petani tidak terdorong untuk melakukan produksi kembali, yang akhirnya perekonomian tidak bisa pulih dengan cepat. Dan dalam jangka panjang bantuan tersebut bisa membuat rakyat jadi tergantung pada pangan-pangan impor.

Waspada! Agenda Neoliberal

Serikat-serikat tani yang tergabung ke dalam Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) bersama-sama dengan Via Campesina, sebuah serikat petani Internasional, menengarai bantuan-bantuan dari CGI dan perusahaan multi nasional membawa agenda-agenda neoliberal dan berorientasi bisnis. Agenda neoliberal itu dipaksakan kepada negara-negara miskin berupa persyaratan terhadap segala bantuan dan utang-utang yang diberikannya.

Bantuan pangan dan infrastruktur pertanian yang diberikan lembaga donor tersebut, dinilai mengancam kedaulatan pangan negara-negara yang dibantunya. Termasuk bantuan

yang diberikan untuk merehabilitasi infrastruktur pertanian di Aceh. Terbukti diantaranya dengan bantuan pangan WFP, dimana ditengarai adanya pangan transgenik dalam paket-paketnya.

Oleh karena itu, FSPI bersama Via Campesina beserta organisasi rakyat lainnya membentuk Koalisi Solidaritas Kemanusiaan Bencana Alam (KSKBA). Lembaga ini dibentuk untuk mengkoordinasikan bantuan ke berbagai lokasi bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya, KSKBA menolak bantuan yang di dalamnya diselipi agenda-agenda neoliberalisme. Karena "Tsunami bantuan neoliberalisme" dampaknya tidak kalah buruk dan merusak dibanding dengan bencana yang telah terjadi.

KSKBA menyatakan bahwa manajemen pasca bencana seharusnya terlepas dari agenda-agenda neoliberal. Rakyat Aceh tidak hanya membutuhkan bantuan yang sifatnya fisik, tetapi institusi masyarakatnya harus dibangun juga. KSKBA akan mengkritisi bantuan-bantuan dari World Bank, WFP, dan lembaga-lembaga besar lainnya. Mereka menentang bantuan berupa produk pangan transgenik, dan menuntut agar semua bantuan harus dijelaskan dari mana sumbernya. Mereka juga menghimbau agar bantuan pangan diberikan dengan cara membeli produk pangan lokal di daerah bencana atau daerah sekitar bencana.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya itu, KSKBA bekerja sama dengan serikat tani dan nelayan setempat, dan organisasi-organisasi rakyat lainnya. Karena yang bisa menyembuhkan luka rakyat Aceh hanyalah orang Aceh sendiri. Tsunami Aceh merupakan tamparan yang maha hebat, rakyat harus bersatu dan bangkit sendiri dari keterpurukannya!

(cr)

Rehabilitasi Tsunami: Belajar Dari Pengalaman Jepang

Sebagaimana kata tsunami telah digunakan di dunia, Jepang telah mengalami banyak tragedi akibat tsunami dan gempa. Sekitar 10% dari seluruh gempa di dunia terjadi di Jepang.

Delapan puluh satu tahun yang lalu, gempa bumi Kanto melanda ibukota Tokyo dan menewaskan 140 ribu orang. Sepuluh tahun yang lalu, 6400 orang terbunuh oleh Gempa besar Hanshin-Awaji. Di Jepang, pemerintah telah mengidentifikasi 62 kasus bencana besar dan lebih dari 200.000 orang kehilangan hidup dalam seratus tahun di abad 20.

Setiap saat, Jepang menetapkan sistem rekonstruksi dan pencegahan bencana. Namun kerusakan besar tetap tak terhindarkan. Rakyat tetap menjadi korban yang paling menderita. Mengapa demikian? jawabannya adalah, waktu itu Jepang membangun untuk perusahaan-perusahaan dan bukan untuk manusia. Sistem belum dibangun dengan cukup bagus. Sehingga setiap kali terjadi bencana, para korban dan gerakan masyarakat akar rumput mendesak pemerintah Jepang mengubah kebijakannya.

Keberhasilan pemerintah Jepang merekonstruksi kerusakan akibat bencana sekilas tampak sangat baik. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Alasan utamanya adalah dukungan perbaikan yang dilakukan pemerintah nasional tidak ditujukan untuk individu. Ketika bencana alam besar melanda dan merusak perumahan, pemerintah hanya mendukung biaya pemindahan puing-puing reruntuhan dan memberikan pinjaman, tetapi tidak untuk membangun kembali rumah penduduk. Di Jepang tidak ada tindakan penanggulangan untuk mendukung petani dan nelayan yang terkena bencana, yang kehilangan lahan pertaniannya atau kapalnya untuk melaut. Padahal itu hal penting untuk keberlanjutan hidup para petani dan nelayan.

Alasan penolakan pemerintah Jepang untuk

memberikan dukungan kepada individu berasal dari kebijakan neoliberal. Mereka mengatakan, "dukungan kepada individu tidak cocok dalam liberalisme negara" dan "lindungi harta benda milikmu sendiri". Namun ternyata secara de facto kebijakan tersebut telah gagal.

Atas desakan gerakan akar rumput, pemerintah mulai merubah orientasinya. Ada beberapa contoh. Pertama, pada tahun 2000 di Tottori dekat Hyogo di mana gempa besar Hanshin-Awaji terjadi. Pemerintah memutuskan memberikan dana khusus untuk membangun kembali rumah-rumah bagi orang yang kehilangan rumah akibat gempa. Kemudian masyarakat yang terkena gempa Nigata Tyuetsu pada bulan Oktober tahun lalu. Pemerintah tidak dapat mengabaikan lagi kebijakan rekonstruksi yang baru yang menyediakan dukungan finansial untuk rekonstruksi perumahan. Kedua, gempa di Hokkaido Barat Daya tahun 1993 menghasilkan

lebih dari 30 meter tsunami yang melanda pulau kecil Okushiri. Di mana 342 rumah hancur, 70% dari total 504 rumah. Juga, pertanian dan perikanan yang merupakan aktivitas ekonomi utama di kepulauan seperti negara Asia kebanyakan.

Pemerintah lokal kota Okoshuri telah memperoleh sekitar 19 milyar yen (1800 juta USD) donasi yang dikumpulkan dari seluruh Jepang. Dan menggunakan uangnya untuk menyediakan dana rekonstruksi rumah yang hancur sebesar 7 juta yen (USD 67.000) per rumah. Ditambah uang belasungkawa bagi keluarga korban sebesar 3 juta yen (USD 29.000) per orang. Sedangkan uang perbaikan rumah yang rusak sebesar 4 juta yen (USD 38.000) per rumah. Sisanya digunakan sebagai dana untuk penanggulangan.

Sumber keuangan untuk proyek-proyek ini adalah donasi dari masyarakat Jepang. Dari banyak segi sangat terbatas karena bukan dana dari pemerintah lokal dan nasional. Meskipun demikian, sementara pemerintah berfokus pada neoliberalisme dan menolak memberikan dukungan secara individu, kota tersebut memutuskan menggunakan uang yang terkumpul untuk rekonstruksi pertanian dan perikanan berdasarkan keinginan masyarakat. Beberapa orang mengatakan bahwa kota Okoshuri akan punah setelah gempa bumi

dan tsunami melanda. Melalui dukungan proyek ini, kota tersebut telah pulih dari bencana.

Memaksakan model ini untuk negara-negara Asia lainnya sangat arogan, tetapi tentunya ada yang berguna untuk kasus rekonstruksi. Meskipun tidak semua, sebagian dari sistem tersebut dapat dijadikan referensi. Rekonstruksi akibat bencana di Jepang telah dibangun oleh gerakan akar rumput. Masyarakat harus melakukannya sendiri dan pemerintah harus mendukungnya.

Tentu saja, dalam pelaksanaannya tidak boleh bekerjasama dengan proyek rekonstruksi yang disiapkan oleh institusi internasional dan Trans National Corporation (TNC) yang mempromosikan neoliberalisme. Program rekonstruksi harus dilakukan sesuai dengan permintaan dari gerakan akar rumput.

Di beberapa negara, pembangunan direncanakan untuk melindungi kepentingan TNC. Rekonstruksi telah digunakan untuk menggusur orang-orang. Untuk menghentikan kekuatan ini, semua orang di seluruh dunia harus bersatu dan melawan bersama-sama. Jika semua petani, nelayan, dan semua orang di dunia ini bersatu, kita tidak akan terkalahkan.

disarikan dari makalah Yoshitaka Mashima dalam konferensi regional tsunami, 17-21 Februari 2004 di Medan

BENCANA TSUNAMI DI INDONESIA

Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia sudah berulang kali mengalami tsunami. Selama tahun 1900 sampai 1996, setidaknya telah terjadi 17 kali gempa yang diikuti gelombang tsunami. Dari tujuh belas kejadian, lima belas diantaranya terjadi di bagian timur Indonesia.

Untuk pertama kalinya, yang tercatat dalam sejarah, tsunami terjadi di Indonesia pada tahun 1883. Kala itu gunung Krakatau meletus, menimbulkan gempa sangat dahsyat. Letusan gunung yang terletak di Selat Sunda itu langsung menggoncang air laut. Konon gelombang yang ditimbulkannya setinggi bangunan 12 lantai. Dalam bencana itu sedikitnya 36 ribu orang meninggal.

Setelah itu, tsunami diceritakan pernah menerjang Ende (Pulau Flores) 1908, Banda pada tahun 1967, Sigli tahun 1961, Tinambung (daerah Sulawesi) 1967, Sulawesi Tengah 1968, Majene 1969, Bandanaira tahun 1975, dan Pulau Sumba pada tahun 1977, Larantuka (Pulau Timor) tahun 1982, Mamuju (wilayah Sulawesi) 1984, dan beberapa tempat lainnya.

Di dekade 90-an, terjadi dua tsunami besar. Tahun 1992 melanda Pulau Flores, bencana itu mengakibatkan 2100 orang kehilangan nyawanya, ratusan bangunan dan rumah-rumah luluh lantak. Kemudian dua tahun berikutnya, pada 3 Juni 1994 giliran ujung timur pulau Jawa yang menjadi sasaran. Kabupaten Banyuwangi adalah wilayah yang paling parah terkena terkaman gelombang, memakan banyak korban jiwa dan bangunan yang hancur.

Bencana yang paling hebat, dilihat dari banyaknya korban jiwa, terjadi baru-baru ini di Aceh dan Sumatera Utara pada 26 Desember silam. Sekitar 160 ribu jiwa meninggal dunia (data 20 Januari 2005) bahkan diperkirakan jumlah tersebut terus membengkak. Bencana

ini tidak hanya melanda Aceh dan Sumatera Utara, gelombang tsunami menyapu juga negara-negara lain seperti Thailand, Srilangka, India, Malaysia, Maladewa dan negara-negara di Afrika Timur. Sampai saat ini, korban jiwa di negara-negara tersebut menembus angka di atas 220 ribu jiwa, korban terbanyak berada di wilayah Indonesia.

Tsunami Aceh diakibatkan oleh pergeseran lempengan Indo-Australia yang bergesekan dengan lempengan Asia Tenggara. Benturan kedua lempengan tersebut menyebabkan patahnya dasar laut yang menimbulkan jurang besar sehingga permukaan air laut turun mengisi lubang tersebut. Setelah terisi penuh air laut berbalik dan membentuk gelombang yang menyapu pantai-pantai di sekitar laut Hindia.

Gelombang menjalar dengan kecepatan luar biasa. Di tengah laut ketinggian gelombangnya sekitar dua meter dengan kecepatan mencapai 800 km/jam, dua kali lebih cepat dari pesawat jet supersonik! Semakin mendekat ke pantai kecepatannya melambat menjadi sekitar 40-60 km/jam namun gelombangnya meninggi, konon tingginya melebihi pohon kelapa.

Saking seringnya peristiwa tsunami di kepulauan ini, orang menamakan Indonesia sebagai daerah "endemik tsunami". Ini adalah sebuah sinyal kepada pemerintah untuk segera membuat program antisipasi terhadap bencana mengerikan ini. Sistem peringatan dini harus segera diterapkan. Itu jika pemerintah tidak ingin rakyatnya habis di gerogoti tsunami. Apalagi golongan yang beresiko besar menjadi korban diantaranya kaum nelayan yang nota bene kehidupannya sudah susah. Pemerintah harus berupaya menyelamatkan mereka dari teror tsunami.



Konferensi Regional Tsunami: MARI BANGKIT KEMBALI!

**KHUSUS
TSUNAMI**

Medan, PeTani- PAGI itu, suasana di sebuah ruangan di Hotel Sumatera Village, Medan terasa hening. Padahal ruangan itu disesaki 100-an orang lebih. Semua tertunduk khidmat dalam suasana mengheningkan cipta untuk korban bencana tsunami yang terjadi 26 Desember lalu. Sampai seseorang mengatakan “selesai”, semua kepala mendongkakan. Dengan tampang serius mereka mulai melanjutkan diskusinya, dengan sebelumnya menyanyikan lagu kebangsaan, Indonesia Raya.

Hari itu, Kamis 17 Februari adalah pembukaan konferensi regional yang bertema “Membangun Kehidupan Petani dan Nelayan Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Asia” yang berlangsung pada tanggal 17-21 Februari ini di Medan. Perhelatan ini digelar oleh serikat-serikat tani di Indonesia yang tergabung ke dalam Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) bekerja sama dengan Via Campesina, sebuah organisasi petani internasional. Konferensi diikuti pula oleh para petani dari berbagai negara, antara lain Thailand, India, Srilanka, Perancis, Italia, Mexico, Jerman, dan Spanyol. Tidak hanya itu, berbagai organisasi non-pemerintahpun berdatangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Mereka berkumpul dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai dampak tsunami terhadap keadaan petani dan nelayan di daerah bencana, sekaligus bertukar pengalaman mengenai pembangunan pertanian dan perikanan laut dengan berbagai negara yang pernah mengalami bencana serupa. Dalam konferensi ini diharapkan adanya gambaran yang jelas mengenai peran lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), negara-negara kaya, dan Non Government Organization (NGO) internasional dalam penanganan bencana alam di tingkat internasional. Sehingga bisa menghasilkan pandangan yang sama dan aksi bersama dalam merehabilitasi dan membangun pertanian dan perikanan di daerah bencana.

Solidaritas saja tak cukup

Dalam pidato pembukaannya, Henry Saragih, Sekertaris Jenderal FSPI dan juga koordinator Via Campesina mengatakan, “Orang-orang di seluruh belahan dunia telah bahu-membahu untuk membantu, tapi persoalan belum selesai.”

Tambak, jaring dan lahan pertanian hancur. Kerusakan di sektor ini mencapai pada taraf yang mencengangkan. Data sementara Departemen Pertanian menyebutkan tidak kurang dari lahan sawah seluas 23 ribu hektar rusak berat dari luas realisasi tanam seluas 42 ribu hektar, kerusakan ini lebih dari setengahnya. Lahan kering seluas 29 ribu hektar rusak berat. Areal perkebunan yang rusak seluas 102 ribu hektar. Di samping itu, terdapat kerusakan berat pada jaringan irigasi seluas 8.275 hektar dan jumlah pompa air yang rusak sebanyak 641 unit.

Untuk sub-sektor perikanan, tidak kurang dari delapan ribu tambak di NAD rusak berat dengan taksiran kerugian sebesar 3,8 triliyun rupiah. Begitu pun dengan

25 ribu hektar hutan bakau, 29 ribu hektar karang bakau, dan 120 hektar kawasan rumput laut lenyap.

Atas dasar itu Via Campesina yang anggotanya tersebar di banyak negara terpanggil untuk menyelenggarakan konferensi sebagai bukti kepedulian terhadap persoalan rakyat di negara-negara yang terkena bencana. Di tingkat internasional, Via Campesina telah menggalang bantuan dalam bentuk simpati, melalui pengumpulan dana, makanan, informasi dan menyebarkannya kepada mereka yang membutuhkan.

Membangun Posko

Sedangkan di tingkat nasional, FSPI bersama anggotanya yaitu Perhimpunan

Masyarakat Tani Aceh (Permata), yang menjadi korban langsung tsunami, mencoba menggalang solidaritas dengan membangun posko dan menyalurkan bantuan pangan di masa darurat. Posko tersebut kemudian berkembang menjadi Koalisi Solidaritas untu Bencana Aceh dan Sumatera Utara (KSKBA), dimana anggotanya tersebar di berbagai kota Indonesia.

Menurut Henry, semua yang dilakukan itu belum seberapa cukup. Permasalahan akan timbul tatkala para petani turun ke ladang, kemungkinan besar ladang-ladang mereka telah hancur. Oleh karena itu Henry menghimbau untuk bersama-sama membangun kembali pertanian yang hancur. Salah satunya dengan membangun reformasi agraria yang menjamin setiap petani untuk mendapatkan lahan garapannya. “Jangan sampai

“Permasalahan akan timbul tatkala para petani turun ke ladang, kemungkinan besar ladang-ladang mereka telah hancur”

setelah peristiwa ini keadaan petani makin buruk. Ini momentum bagi kita bagaimana menata sistem kehidupan yang lebih baik, dan petani punya

tanah yang cukup untuk diolah. Kita perlu mencegah perampasan tanah petani. Maka reformasi agraria menjadi penting untuk diperjuangkan pasca tsunami” ujarnya.

Disamping itu, kedaulatan pangan merupakan isu yang penting untuk diperhatikan. Secara khusus ia mengkritik bantuan pangan dari luar negeri. Impor pangan besar-besaran menimbulkan kekuatiran para petani lokal, karena stok pangan lokal bisa terganggu. Para petani lokal tidak menginginkan harga beras lokal turun secara drastis karena adanya bantuan tersebut. Pihaknya menghimbau agar bantuan pangan terutama beras dibeli dari petani lokal. Henry juga mengatakan, “Belilah beras dari Aceh, atau Sumut. Kalau tidak cukup belilah dari daerah lain di Indonesia.”

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Munawiyah, petani dari Aceh dan pengurus Permata, “Kami menghimbau kepada kawan-kawan yang punya perhatian, kalau bersedia membantu atau sumbangan berupa sembako, kami minta hendaknya membeli barang-barang dari Aceh. Kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya telah hancur, kami berharap bisa membangun kembali.”

Dalam pertemuan itu, Indra Sago, ketua Presidium FSPI menggaris bawahi mengenai kemungkinan agenda terselubung bantuan-bantuan asing, terutama bantuan pupuk dan benih transgenik. Menurutnya agenda neoliberal dalam bantuan serupa itu bisa menyebabkan ketergantungan petani. Indra menghimbau agar pemerintah daerah Aceh agar berhati-hati.

Koferensi yang berlangsung selama empat hari itu, mengundang juga para petani dari Jepang yang memaparkan pengalaman mereka merehabilitasi pertanian akibat tsunami. Banyak pengalaman yang bisa digunakan, walaupun tidak seluruh dari pengalaman tersebut cocok untuk diterapkan di Aceh dan Sumatera Utara. Karena setiap daerah punya keunikan tersendiri. Harapan satu-satunya untuk bangkit kembali dari keterpurukan akibat tsunami sangat bergantung pada korban itu sendiri. Bantuan hanya bersifat sementara. Apalagi dewasa ini banyak bantuan yang memiliki agenda-agenda tertentu di dalamnya. Terutama bantuan dari lembaga-lembaga yang orientasi kebijakannya mengarah ke neoliberalisme.

Konferensi ini menghasilkan sebuah kesepakatan yang disebut “Deklarasi Medan”. Deklarasi ini diantaranya berisi himbauan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi daerah bencana dengan tidak mengabaikan kedaulatan para korban, menolak bantuan yang beragenda neoliberalisme, menolak bantuan pangan produk hasil rekayasa genetik, dan mendesak dilakukannya reforma agraria pasca tsunami. (cr)

PEMBAHUAN TANI/KSKBA



PEMBAHUAN TANI/KSKBA



www.classroomclipart.com





Tsunami, Sebuah Jalan Bagi Modal

Oleh:
Satya Sivaraman



Ada sebuah fenomena dalam istilah Jepang, akibat benturan lempengan India dan Burma yang terjadi di dasar laut dan menyeruak di Indonesia. Menghantam pantai dan selusin negara, meliputi dua benua, menyapu jutaan kaki mereka, memutarbalikkan kehidupan mereka dalam hitungan menit, meninggalkan jejak tragedi dalam hidupnya.

Jika saja kabar menggetirkan tersebut sama halnya dengan krisis finansial, bisa jadi anda lupa untuk memikirkannya juga. Sebagai sebuah metafora, tsunami, sedang terjadi juga dalam bentuk proses globalisasi korporasi. Tulisan ini tidak hanya menggugah ingatan tentang tsunami dan gempa bumi mematikan yang menghantam sebagian dari benua Asia dan Afrika. Lebih jauh lagi memperingatkan ada sebuah kekuatan global korporasi internasional yang kekuatannya dari segi modal dan kemampuan sangat besar, terlepas dalam periode waktu yang singkat serta cakupannya meliputi seluruh negeri. Kekuatan itu tidak dapat dihentikan dan kosekuensinya benar-benar membinasakan. Terutama terhadap rakyat miskin, dampaknya sama membinasakan dengan bencana tsunami.

Renungkanlah. Kecuali alasan-alasan alamiahnya, badai yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 itu sama besarnya dengan bencana dahsyat yang diakibatkan oleh penyatuan antara ekonomi neoliberal dan politik imperialis yang mendominasi dunia kita saat ini.

Rakyat kecil sebagai korban Seperti juga korban-korban tsunami, sebagian besar negara-negara yang mengalami kehancuran oleh globalisasi adalah negara berkembang. Negara tersebut sedang berjuang menghadapi membengkaknya populasi, kekurangan kebutuhan dasar, dan konflik sosial. Di negara-negara tersebut sebagian besar dampak tsunami dirasakan oleh kelompok miskin atau keluarga berpenghasilan rendah. Sama halnya dengan ambruknya ekonomi yang disebabkan oleh krisis finansial Asia di tahun 1997.

Badai global dari spekulasi modal itu bagaikan tsunami tidak melihat dan menghormati lagi kedaulatan ataupun batasan negara. Spekulasi modal menjaral dengan kecepatan yang menakjubkan menghantam negara-negara dari Srilanka hingga ke Somalia.

Hal yang menakutkan dari bencana tsunami di Asia, darah dan kematian, bisa kita lihat juga dari bencana global yang diciptakan oleh manusia ini. Tidak hanya dari konsekuensi ekonomi global tapi juga dari konsekuensi politiknya, yaitu konflik dan perang.

Lebih jauh lagi, perang global terhadap teror yang dikumandangkan Amerika Serikat, tidakkah menebarkan kematian dan kerusakan yang skalanya sama dengan tsunami? Tentu tidak kurang, bahkan sama saja. Dimana jumlah manusia yang mati karena invasi Amerika Serikat ke Afganistan dan Irak, sama dengan jumlah yang hilang pada tsunami di Indonesia,

India, Srilanka, dan Thailand. George Bush Junior pada saat itu mungkin melakukannya dengan sedikit lebih lambat, tetapi kerusakan yang diakibatkan oleh kebijakkannya sebanding dengan bencana alam terbesar di dekade ini.

Tapi sebelum kita semua terpuruk dalam kesedihan akibat tsunami, berkaca pada realitas global pada saat ini, ada sebuah tanda dan harapan besar terhadap respon bencana alam. Kedermawanan diperlihatkan oleh masyarakat umum, sedangkan pemerintah, korporasi, dan institusi besar dengan malu-malu mengikutinya.

Bangkitnya Gerakan Sosial

Solidaritas tsunami adalah hal yang baik. Solidaritas tersebut bukan sebuah kemustahilan, mereka telah menunjukkan bahwa dunia luar juga hidup dan ada di tengah-tengah kita. Solidaritas itu tumbuh dari lubuk hati yang paling dalam, dari sumber mata air nurani. Kepedulian dan rasa senasib sepenanggungan antara manusia yang satu dengan lainnya akan melintasi batas apapun. Gerakan keadilan global dimana pun menampakkan kekuatannya. Ini adalah sebuah rasa kemanusiaan yang agung, menimbulkan kekuatan untuk memerangi kehancuran sosial, ekonomi atau bencana tsunami yang akan datang, dengan caranya sendiri menuju dunia yang lebih baik.

Diterjemahkan dari "Tsunami As Metafore", dalam Terrava, sebuah media independent World Social Forum (WSF), edisi 26-31 January 2005.

POIN-POIN PENTING DALAM DEKLARASI MEDAN

Deklarasi Medan ini membahas pembangunan kembali kehidupan petani dan nelayan setelah bencana gempa bumi dan tsunami

Organisasi petani, nelayan dan korban bencana gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 termasuk juga Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) yang bekerja dengan organisasi petani dan nelayan bersama-sama dalam "Konferensi Regional Pembangunan Kembali Kehidupan Petani dan Nelayan Setelah Bencana Gempa Bumi dan Tsunami" pada tanggal 17 sampai 19 Februari 2005. Lebih dari 80 peserta dari 11 negara mewakili sekitar 20 organisasi hadir pada kegiatan tersebut. Berikut ini kutipan dari deklarasi tersebut:

Dalam kasus masyarakat tani:

Rumah harus dibangun di lokasi asli, berdasarkan pada praktek tradisional dan pengetahuan lokal, dan hal ini berlawanan dengan apa yang dicoba oleh pihak-pihak resmi (dari pemerintah) yang mencoba merelokasi masyarakat dengan alasan keamanan. Dalam kasus keamanan yang potensial, dialog dengan anggota masyarakat yang menjadi korban menunjukkan bahwa mereka meminta pemecahan masalah yang efektif bagi kepentingan rakyat.

Pastikan petani tidak dialihkan dari tempat dan tanah mereka yang asli, dan tentunya mereka dapat bertani kembali di ladang/sawah mereka yang sedia kala.

Jamin hak yang jelas bagi para petani atas tanah mereka, termasuk hak-hak khusus bila dimungkinkan; termasuk garis batas yang jelas antara tanah yang mereka tempati sebelum tsunami, dan dalam kasus ini jika tanah tersebut tersapu oleh tsunami maka pembagian tanah atas petani secara adil harus dapat terjamin.

Dalam kasus tanah yang dikehendaki oleh perusahaan transnasional dan pihak-pihak lain yang berminat, maka usaha rehabilitasi haruslah memastikan bahwa tanah dikembalikan kepada pemilik tanahnya yakni petani itu sendiri.

Sistem irigasi, sumur tradisional, sanitasi dan sumber air harus direhabilitasi dan dipulihkan kadar garamnya, jika perlu. Petani dan organisasi mereka harus memiliki peranan yang penting dalam rencana ini, juga dalam menjalankannya.

Usaha rehabilitasi dan rekonstruksi harus menekankan pada kedaulatan pangan, termasuk juga program reforma agraria sejati.

Kami meminta pihak yang berwenang untuk menolak bantuan makanan hasil rekayasa genetika (GMO) dan bantuan makanan impor apapun yang mengancam harga lokal, membeli makanan untuk bantuan secara lokal dimanapun yang memungkinkan, dan menyesuaikan budaya lokal serta kebiasaan sosial dan preferensi-preferensinya.



KSKBA/PEMBARUAN TANI



Kerusakan Akibat Tsunami



Korban-korban Tsunami

Langsa, di Belakang Bencana

Sebuah Laporan
dari Langsa, NAD

Oleh Isabelle Delforge



Memastikan perdagangan dan sistem pasar yang adil dan juga infrastruktur transportasi untuk produk pertanian yang akan menjamin harga yang pantas untuk panen dan biaya untuk input pada level nasional.

Pelatihan umum dan pendidikan untuk membangun sumber daya manusia di antara para petani, dan pusat pelatihan untuk pertanian organik harus menjadi riil. Mempromosikan daerah yang tersapu tsunami sebagai lahan pelatihan bagi pertanian organik sebagai salah satu alternatif bagi proses menekan perusahaan multinasional yang memproduksi bibit transgenik (GMOs) dan produksi pertanian yang industrialis.

Kerjasama yang diatur oleh petani dan organisasi mereka harus dibuat.

Dalam kasus nelayan dan masyarakat pinggir pantai:

Mendesain proyek perumahan yang aman dan pantas untuk nelayan dan masyarakat pinggir pantai yang berkaitan dengan aktivitas pinggir pantai dan perikanan.

Mencegah kepentingan perusahaan/korporasi termasuk industri turis dan travel, yang akan mengubah area pantai sebagai tempat aktivitas pencarian laba perusahaan/korporat.

Memastikan peralatan dan perlengkapan bagi komunitas nelayan kecil dan semuanya dibuat oleh produksi nelayan lokal.

Memastikan bantuan pemerintah bagi pembangunan bagi nelayan tersalurkan pada masyarakat nelayan kecil, tradisional, dan berbasis pantai. Bukan pada industri besar, dan berbasis pelabuhan.

Mencegah pengalihan masyarakat nelayan dari daerah pantai dan pengakuan terhadap hak, pengolahan dan akses mereka kepada sumber daya di daerah pantai.

Mendorong lembaga legislatif untuk memastikan area perikanan yang khusus bagi nelayan tradisional, berskala kecil, dengan jarak yang ditentukan dengan lokal secara pantas, juga dengan konsultasi dengan masyarakat nelayan dan organisasi mereka.

Memastikan rencana rehabilitasi mengikutsertakan nelayan, masyarakatnya dan organisasi mereka, menghormati hukum adat, hak dan prakteknya secara tradisional.

Menekankan sementara kita menolak agenda neoliberal dalam rekonstruksi dan rehabilitasi tsunami, nelayan dan organisasi mereka memfokuskan bahwa prinsip-prinsip yang telah diatur di atas diwujudkan dan aplikatif pada semua bencana, besar maupun kecil.

Memperkuat organisasi nelayan lokal, nasional, regional dan internasional dan masyarakat nelayan.

Sebagai NGO dan organisasi lain yang bekerja mendorong organisasi petani dan nelayan serta masyarakatnya, kami meyakinkan diri kami, untuk:

Mendukung pertahanan tenaga kerja intensif, perikanan yang berbasis pantai, dan kepentingan kehidupan petani, juga memonitor upaya bantuan dana dan rekonstruksi.

Memperkuat kewaspadaan dan kampanye menolak "pembuangan" kapal-kapal nelayan yang sudah tidak terpakai dari negara industri pada area yang dilanda tsunami.

Mendukung inisiatif dari korban dan masyarakatnya untuk adanya audit sosial dari bantuan dana dan upaya rekonstruksi sehingga mereka dapat mengontrol bagaimana dan untuk apa dana tersebut digunakan.

Meminta pemerintah dari negara yang terkena tsunami untuk menolak aktivitas dan kebijakan yang anti-rakyat dan anti-demokrasi, dan menghormati hak-hak rakyat demi keadilan tanpa diskriminasi apapun, apakah berkaitan dengan kebangsaan, etnis atau agama dan kepercayaan, dan menjamin kedaulatan hal-hal tersebut di atas dalam proses bantuan dan upaya rehabilitasi.

Menekan NGO internasional untuk merespon pembangunan kapasitas dan keperluan lain dari organisasi petani dan nelayan dalam rangka memperkuat mereka untuk mendampingi petani dan nelayan membangun kembali kehidupan mereka menurut kebutuhan mereka sendiri.

Diambil dari naskah Deklarasi Medan tanggal 21 Februari 2005 yang disahkan di Langsa, Aceh, Indonesia oleh FSPI dan 27 lembaga lainnya, yang merupakan peserta Konferensi Regional dalam Membangun Kembali Kehidupan Petani dan Nelayan Paska Gempa dan Tsunami. ■

Kami sampai di belakang bencana di Langsa, pantai timur Aceh, Indonesia. Disini semuanya tampak lambat dan tenang; kota kecil ini ternyata selamat, walaupun bencana masih menyimpan banyak kerugian, dan dimanapun tatapan mata sayu rakyat selalu bergandengan dengan senyum letih mereka. Agus Syahputra, koordinator dari pusat solidaritas bersama untuk korban tsunami menunjukkan statistik mengejutkan tentang kota ini: bahwa Langsa telah menerima 4051 orang pengungsi!

Disini tidak ada kamp-kamp pengungsi, atau bantuan internasional. Adalah rakyat setempat yang menyelamatkan, yang menanggulangi kepanikan dan bertanggung jawab pada kedatangan para pengungsi ini. Pada hari-hari awal pasca-tsunami, para pengungsi datang dengan cara mengikuti jalan raya (antarkota) dan menumpang dengan kendaraan apapun yang mereka temui. Sedangkan yang lain, datang melalui puing-puing bekas terjangan tsunami dengan cara apapun yang mereka bisa.

Agus Syahputra menjelaskan bahwa gerakan rakyat Indonesia telah dimobilisasi secepatnya segera setelah bencana ini terjadi. NGO kecil milik Agus, Yayasan Biduk Alam, adalah salah satu anggota KSKBA (Koalisi Solidaritas Kemanusiaan untuk Bencana Alam: untuk Aceh dan Sumatera Utara). Agus mengkoordinasi stasiun ketiga untuk bantuan setelah Jakarta dan Medan, di jalan raya menuju Banda Aceh. Yang disalurkan disini adalah makanan, pakaian dan obat-obatan, dikumpulkan dari seluruh anggota jaringan di seantero negeri.

FSPI (Federasi Serikat Petani Indonesia) adalah anggota aktif dari koalisi ini, yang juga dikoordinasikan oleh Via Campesina, yang merupakan organisasi pergerakan petani internasional (termasuk juga di dalamnya FUJA-Front Persatuan Petani di Perancis). Anggota FSPI juga ada yang berlokasi di Banda Aceh, PERMATA--dan kantor PERMATA ini luluh lantak diterjang ganasnya tsunami, serta pemimpin mereka tidak dapat ditemukan hingga kini. Pesanan melalui SMS beredar mengabarkan bahwa pemimpin mereka ini masih hidup, tapi tidak satupun orang yang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan suara terguncang dan gemetar mereka mengabarkan teman-teman mereka yang dikabarkan hilang.

Disini diantara trauma tersebut, akhirnya tim logistik muncul dan mereka bisa bicara tentang rekonstruksi. "Kami menginginkan rekonstruksi yang mengandalkan dan mendorong organisasi lokal", begitu

dijelaskan oleh Indra Lubis, juru bicara dari FSPI. "Kami tidak ingin bencana tsunami dijadikan alasan untuk membangun pertanian dengan cara industri, dengan adanya penanaman modal yang besar", tambahnya. FSPI menuntut rekonstruksi dengan dasar reforma agraria yang dapat menjamin akses seluruh rakyat pada sumber-sumber daya. Tentunya hal ini dikemukakan dengan alasan bahwa rekonstruksi Aceh dan Sumut ini dapat dijadikan rumus bagi para pemodal besar untuk mengubah para petani dan nelayan yang independen menjadi pekerja/buruh bagi pertanian besar dan industri perikanan.

Sama seperti apa yang dikatakan oleh Koalisi Anti Utang (KAU), FSPI menyerukan kepada pemerintah dan komunitas internasional untuk memastikan tsunami tidak dijadikan alat bagi pemodal besar, perusahaan internasional dan kreditor untuk mewujudkan kemiskinan baru. FSPI juga menyerukan untuk pengampunan dan pembatalan utang luar negeri Indonesia. Di Langsa inilah tempat yang begitu dekatnya dengan bencana, para pemimpin lokal mencoba untuk mengatasi kepanikan yang terjadi di seantero negeri, berdaya upaya semaksimal mungkin untuk membantu rakyat dengan nyata, dan menyerukan rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara dengan pandangan-pandangan yang manusiawi dan berpihak kepada rakyat.

Isabelle Delforge, seperti yang diterjemahkan oleh Muhammad Ikhwan. 10 Januari 2005

Isabelle D. Untuk PEMBARUAN TANI



Isabelle D. Untuk PEMBARUAN TANI





...Serambi Mekkah, Negeri

Gempa bumi dan tsunami yang menghantam Serambi Mekkah dan sebagian Sumatera Utara telah membangkitkan kepedulian umat manusia dari seluruh penjuru dunia. Gelombang dengan tinggi 25 meter dengan ganasnya menerjang daratan dan menyapu bersih segala sesuatu yang ada dihadapannya. Rumah, mobil, motor, pepohonan, lahan pertanian, bahkan ratusan ribu nyawa manusia hilang dalam sekejap dihantam gelombang tsunami.

Data terakhir dari Departemen Kesehatan (20/01/05) menyebutkan bahwa jumlah korban meninggal akibat gempa dan badai tsunami di Provinsi NAD diperkirakan sekitar 166.080 jiwa dan di Sumatera Utara sebanyak 240 jiwa. Dari jumlah tersebut yang telah dimakamkan sebanyak 89.832 orang. Korban yang menjalani rawat inap di rumah sakit sebanyak 1.736 orang dan rawat jalan 36.881 orang. Pusat gempa yang berada di laut kurang lebih 149 km selatan Meulaboh, Aceh Barat, juga menimbulkan korban jiwa di sejumlah wilayah India, Srilangka, Maladewa, Thailand dan Malaysia.

Bencana alam telah menghilangkan batas-batas antar negara untuk saling membantu. Bala bantuan yang diterima Aceh dari dalam dan luar negeri pasca tsunami telah mencetak rekor bantuan internasional (trilyunan rupiah), termasuk relawan asing dan relawan domestik.

Dulu sebelum bencana Tsunami terjadi, sulit untuk masuk kota Banda Aceh dan sekitarnya karena kondisi keamanan akibat perang sehingga propinsi ini ditetapkan sebagai daerah darurat militer. Tapi sekarang yang terjadi adalah kebalikannya, setiap orang dari manapun berasal dengan bebas bisa masuk ke Aceh dengan mengusung tema-tema kemanusiaan.

Kedatangan Relawan dan Militer Asing

Beberapa hari setelah Bencana Tsunami Aceh seperti sebuah negeri tak bertuan. Kondisi kantor pemerintahan yang hancur menyebabkan pelayanan dan roda pemerintahan tidak berfungsi normal. Semua pegawai pemerintah sibuk mencari sanak saudaranya yang hilang terkena tsunami. Sementara itu kepala Pemerintahan NAD tidak bisa berbuat banyak karena meringkuk di Penjara Cipinang karena kasus korupsi pembelian Helikopter dari Rusia.

Koordinasi pemerintah pusat juga kedodoran dalam

memberikan pertolongan dan juga belum efektif setelah mengambil alih pemerintahan di Aceh. Pemerintah malah sibuk rapat antar instansi yang tidak tahu hasilnya apa. Sampai mengadakan KTT Tsunami dengan mengundang lembaga pemberi hutang (ADB dan Bank Dunia). Kacaunya koordinasi semakin kelihatan lagi dengan keluarnya Surat Keputusan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla Nomor 1 tahun 2004 yang tidak dikenal dalam mekanisme perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lagu lama "saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab" mulai terdengar lagi.

Sementara pemerintah masih sibuk dengan koordinasi yang tidak jelas, kapal induk asing dengan ribuan tentaranya telah mendaratkan sauhnya di wilayah kedaulatan Republik Indonesia tercinta ini. Militer asing berdatangan dari negeri seberang. Pasca Tsunami, Aceh menjadi sangat terbuka terhadap orang asing. Ratusan tentara berkulit putih dan relawan asing yang hilir mudik menjadi pemandangan sehari-hari di Banda Aceh dan sekitarnya.

Dari atas Kapal Induk USS Abraham Lincoln yang berlabuh sejak 31 Desember yang lalu, Amerika telah mengerahkan

13.000 pasukannya. Kapal induk AS ini dikabarkan membawa sedikitnya 75 helikopter (Detikcom, 13/1), tapi sumber lain cuma mencatat 17 helikopter Sea Hawk (Koran Tempo, 14/1). Mereka mengaku telah menerbangkan 219 misi kemanusiaan. Sudah 2,06 juta pon bantuan dan peralatan yang dikirim, antara lain 16.500 galon air, 433.000 pon makanan, dan 1,4 juta pon perlengkapan nonmedis. Terasa hebat betul kedengarannya ditelinga kita.

Australia tak mau kalah berlomba-lomba dengan AS mengirimkan kapal induk HMAS Kanimbla yang mengangkut 4 helikopter Sea King, 4 pesawat Hercules, 1 unit pesawat 707, dua kapal pendarat (LCM8) besar, fasilitas medis, perbekalan dan pangkalan terapung. Sekitar 600 prajurit Australia dikerahkan dalam operasi kemanusiaan itu (Republika, 12/1). Namun sumber lain mengungkap 1.016 tentara Australia beserta dokter dan perawat yang diterjunkan (Detikcom, 14/1).

Selandia Baru mengirimkan 2 unit pesawat Hercules yang membawa 30 orang tim medis Angkatan Pertahanannya beserta perbekalan. Sedang pemerintah Jerman mengirimkan 30 militer dan tenaga ahli listrik dan penyulingan air, serta membangun



www.classroomclipart.com

Sementara pemerintah masih sibuk dengan koordinasi yang tidak jelas, kapal induk asing dengan ribuan tentaranya telah mendaratkan sauhnya di wilayah kedaulatan Republik Indonesia tercinta ini. Militer asing berdatangan dari negeri seberang. Pasca Tsunami, Aceh menjadi sangat terbuka terhadap orang asing. Ratusan tentara berkulit putih dan relawan asing yang hilir mudik menjadi pemandangan sehari-hari di Banda Aceh dan sekitarnya.

Seribu Bendera?



Seorang tentara asing tampak sedang berputar di atas area Nanggroe Aceh Darussalam dengan menggunakan helikopter. Semenjak bencana tsunami melanda saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Utara, tak henti-hentinya bantuan asing datang, dan dibuka pulalah kemudahan bagi tentara dan relawan asing untuk masuk ke wilayah Indonesia dalam masa darurat ini. Walau kita sadar bahwa kehadiran mereka untuk kemanusiaan, namun kita harus tetap waspada dengan segala kemungkinan agenda-agenda asing yang dapat memasuki Indonesia melalui jalur Aceh dan Sumatera Utara ini. Diantaranya yang ganjil adalah bantuan impor beras dari WFP (World Food Programme). Seharusnya rakyat menjadi subjek bagi masa darurat, perbaikan maupun pembangunan bencana ini. Bukan sebaliknya, malah menjadi objek.

rumah sakit bergerak. Sementara itu beberapa lain juga mengirimkan bantuannya ke Aceh seperti Malaysia, Prancis, Rusia, Jepang dan beberapa negara Arab lainnya.

Tidak ada data yang persis berapa sebenarnya tentara asing yang masuk ke Aceh. Menurut Posko Informasi TNI, personil militer asing yang ada di Aceh berjumlah 3.171 orang dari 14 negara, relawan asing berjumlah 1.125 orang dari 31 negara. Tapi jika melihat data diatas jumlah pasukan asing melebihi dari data yang ada tersebut.

Pemerintah RI telah memberikan klarifikasi Pengaturan Berkunjung untuk Media dan Organisasi Asing. Seluruh WNA yang berkunjung ke Provinsi NAD diminta untuk mendaftar di Posko Departemen Luar Negeri Gedung A2 di Pendopo Gubernur NAD (Posko Utama). Kita tidak tahu apakah posko itu akan efektif mengingat begitu banyak pintu yang di buka oleh Pemerintah Indonesia bagi orang asing untuk bisa masuk ke Aceh.

Indonesia seharusnya mencontoh kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah India pasca tsunami. India negara di Asia yang terkena bencana gelombang tsunami akan tetapi India menetapkan peraturan yang

ketat terhadap semua bantuan dan tentara asing yang akan masuk ke wilayah mereka. Setiap bantuan dari luar yang masuk ke India hanya diperbolehkan masuk melalui New Delhi. Hal itu dilakukan untuk tetap menjaga pertahanan dan keamanan wilayah mereka.

Banyaknya pintu masuk bagi bantuan dan militer asing ke Indonesia, menyebabkan sulitnya koordinasi, disamping itu pemerintah juga kesulitan mengetahui berapa sebenarnya jumlah orang asing yang berada di Aceh.

Walaupun Presiden RI sudah menegaskan bahwa keberadaan pihak asing ke Indonesia semata mata karena alasan kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan politik, tapi kita harus tetap waspada terhadap niat lain negara pemberi bantuan khususnya AS. Siapa yang tidak kenal Amerika, sebuah negara yang selalu ingin menguasai negara lain dengan berbagai cara. Bukan tidak mungkin motivasi kemanusiaan AS juga dibarengi niat untuk menguasai Indonesia.

Bencana Alam di Aceh dan Sumatera Utara adalah duka dunia. Berbagai bantuan yang datang dari negara lain harus kita hargai sebagai rasa solidaritas antara sesama umat manusia.

Akan tetapi bersikap waspada itu penting. Membangun kehidupan di Aceh adalah mutlak kita yang menentukan sebagai pemilik republik ini. Bukan diberikan kepada orang asing untuk ikut campur tangan mengotak-atiknya, kedatangan mereka hanya membantu tidak lebih dari itu.

Kita tidak layak menyerahkan masalah Aceh kepada negara-negara dan lembaga yang mengusung agenda neoliberalisme untuk masuk ke Aceh. Tidak boleh pula bagi siapapun berdiam diri terhadap pasukan asing yang melakukan intervensi untuk memperluas cengkeramannya dengan dalih memberikan bantuan guna menyelesaikan masalah ini. Masih banyak tentara negeri ini yang bisa menyelesaikannya

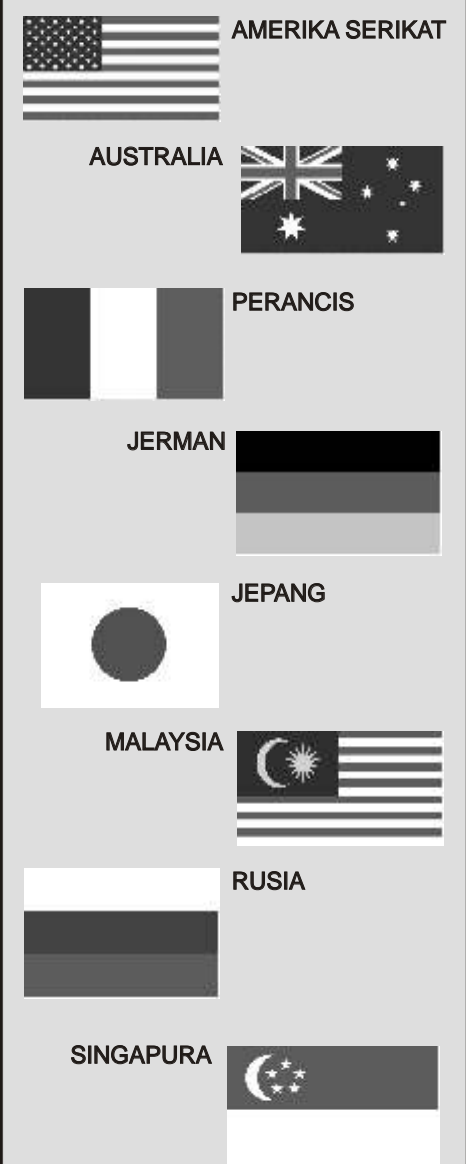
Sebagai bangsa yang sudah merdeka selama enam puluh tahun dan berdaulat penuh atas seluruh wilayah negara ini kita harus tegakkan kehormatan dan kedaulatan bangsa dalam menyelesaikan persoalan Aceh. MERDEKA...!! (tz)



DARI MANA SAJA MEREKA?

- **AMERIKA SERIKAT:** 2 KAPAL INDUK, 75 HELIKOPTER, 8 KAPAL PERANG
- **AUSTRALIA:** 1 KAPAL INDUK, 4 HELIKOPTER, 4 PESAWAT HERCULES, 1 UNIT PESAWAT 707, 2 KAPAL PENDARAT BESAR
- **SELANDIA BARU:** 30 TIM MEDIS, 2 UNIT PESAWAT HERCULES
- **JERMAN:** 40 TENAGA AHLI
- **SINGAPURA:** 6 HELIKOPTER, 2 SUPER PUMA
- **MALAYSIA:** 5 TIM MEDIS, 2 PESAWAT HERCULES, 2 HELIKOPTER, 1 PESAWAT Cn235
- **BRUNEI DARUSSALAM:** 2 HELIKOPTER BLACKHAWK, 1 PESAWAT Cn235
- **PERANCIS:** 7 HELIKOPTER SUPER PUMA
- **RUSIA:** 47 TENAGA MEDIS, 8 PESAWAT, 6 TRUK, 5 ALAT BERAT
- **JEPANG:** 22 TIM MEDIS
- **ARAB SAUDI:** BEBERAPA TIM BANTUAN DENGAN JANJI BANTUAN SEKITAR 500 JUTA DOLLAR
- **KUWAIT:** TIM BANTUAN DENGAN JANJI SEKITAR 10 JUTA DOLLAR
- **QATAR:** TIM BANTUAN DENGAN JANJI SEKITAR 20 JUTA DOLLAR

BENDERA ASING YANG BERKIBAR DI ACEH





WTO KELUAR DARI PERTANIAN!



Hongkong, PeTani- PADA awal tahun 2005, Hongkong begitu dingin bagi kita yang berasal dari Indonesia, tepatnya pada tanggal 12 sampai dengan 14 Januari 2005 Oxfam Hongkong yang bermarkas di Kowloon mengundang berbagai organisasi non pemerintah, pemerintah dan organisasi massa, termasuk Federasi Serikat Petani Indonesia sebagai anggota La Via Campesina dari wilayah asia timur dan tenggara, organisasi-organisasi non pemerintah seperti Oxfam Internasional, Cina, CEDAC-Kamboja, AOP-Thailand, Buruh Migran serta aliansi masyarakat Hongkong lawan WTO menghadiri acara ini. Perwakilan FSPI dihadiri oleh Achmad Ya'kub dan Tejo Pramono staff la Via campesina.

Ditengah kota yang begitu padat dan sempit namun rapih ini, kegiatan mengenai "jalan WTO" (Organisasi Perdagangan Dunia) menuju Hongkong dilaksanakan. Karena pada bulan desember 2005 nanti, pertemuan tingkat tinggi WTO akan digelar di Hongkong. Acara yang bertajuk "Konferensi Regional tentang Negosiasi Pertanian di WTO: implikasinya terhadap perdagangan dan pertanian di asia timur" berlangsung dengan banyak perdebatan.

Perwakilan pemerintah Indonesia, dalam hal ini dari Departemen Pertanian dihadiri oleh salah seorang Dirjenya yaitu Ibu DR. Delima Hasri Azahari mengatakan, "kegagalan dalam pembangunan pertanian akan mengakibatkan penduduk akan mengalami kekurangan gizi yang akut dan lingkaran setan kemiskinan di desa". Hal inilah yang merupakan faktor utama yang membuat Indonesia menjadi negara importir pangan, tambahannya. Prak Sereyvath, dari CEDAC-Kamboja, menyatakan secara formal Cambodia menjadi anggota WTO yang ke 147 pada tanggal 13 Oktober 2004. Maka sejak itulah kebijakan pertaniannya berubah. "Kamboja tidak pernah melarang ataupun membatasi import, tariff import turun menjadi rata-rata 17% saja" kata Prak. Namun pemerintah masih melindungi petani dengan memberikan tariffs sebesar 40% untuk produk pertanian seperti beras, imbuhnya.

Bandingkan dengan Indonesia yang telah meliberalkan produk-produk pertanian dengan import murah, sampai dengan hanya 0-5% dan hampir 6000 jenis yang diliberalkan, menyebabkan persoalan-persoalan ekonomi dan politik. Indonesia pada 10 tahun terakhir adanya surplus perdagangan, dari 1,62 juta US\$ menjadi 2,15 Milyar US\$. Namun bagaimanapun Indonesia tidak pernah mengalami surplus dalam keseimbangan import-eksport. Kita selalu import lebih banyak dan itu makin meningkat tiap tahunnya, Achmad Ya'kub menyatakan dengan tegas.

Cina, nekat

Apa yang terjadi bila negara sebesar China begitu mati-matian ingin menjadi anggota WTO, padahal karakter petani-nya



Aksi Korean Peasant League (KPL) menentang WTO

sama saja dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, Kamboja. Lihat saja rata-rata petani hanya memiliki tanah kurang dari 8 mu/keluarga petani (1 hektar=15mu), buruh tani yang banyak, keahlian yang rendah dan beberapa daerahnya masih banyak yang petani subsisten. Menurut Phoenix Leung, "Petani menghadapi pajak pertanian yang begitu tinggi, pendapatan rendah pada tahun 2003 hanya 2.622 Yuan (320 dollar US), lambatnya perkembangan dipedesaan, ketimpangan pendapatan yang tinggi antara desa dan kota, rasio 1:6, kemiskinan di pedesaan". Namun mengapa pemerintah RRC begitu ngotot ingin menjadi anggota WTO, ternyata dari banyak kelemahan itu China sudah mempersiapkan segala macamnya untuk bersaing dengan negara lain dan sebagai jalan memproteksi pertaniannya. Misalnya adalah menghambat kedelai import dari Amerika dengan alasan kesehatan, China mampu meng-eksport tidak hanya jeruk dan lainnya namun juga produk olahan seperti permen, makanan kering dari buah-buahan dan lainnya.

"Janji akan terjadinya pengurangan kemiskinan adalah akal-akalan dan tipuan besar di dunia, yang sangat jauh dari kenyataan. Sebelum kesepakatan liberalisasi yang diatur dalam WTO dilaksanakan saja telah banyak penderitaan yang kini tengah dihadapi oleh jutaan umat manusia di dunia"

Romain Benicchio dari oxfam internasional menuturkan bahwa, dalam perundingan WTO juga terdapat blok-blok negara yang bersatu dengan kepetingan praktis, seperti group-33 yang dimotori oleh Indonesia yang memperjuangkan Spesial Produk, group-33 terdiri dari China, Brasil, Philipina, Thailand, Afrika Selatan dan lainnya dengan maksud menghadang usulan-usulan Amerika dan Eropa.

WTO, keluar dari Pertanian

Namun apapun juga Ketika persoalan perdagangan diatur secara multilateral dan tidak seimbang, maka sebenarnya yang terjadi adalah penjajahan. Karena bila aturan perekonomian sebuah negara diatur secara multilateral sebagai mana yang WTO inginkan maka yang terjadi adalah penghilangan kedaulatan sebuah negara. Mekanisme perdagangan secara bebas semacam ini menghilangkan kontrol masing-masing negara menyangkut perekonomian dari rakyatnya. Kontrol pada perekonomian yang menyangkut kehidupan rakyat akhirnya diserahkan pada pasar yang berjalan dengan mekanisme untuk mendapatkan keuntungan sebesar-

besarnya. Dan di sinilah hakekatnya penjajahan hendak dikuatkan kembali, dengan pasti diutarakan oleh Achmad Ya'kub.

Oleh karena itu, gerakan rakyat seluruh dunia akan mempunyai agenda bersama menghadang WTO di Hongkong pada bulan Desember 2005. Sebagai suatu gerakan maka, demonstrasi merupakan alat perjuangan yang mempunyai efek yang luas. Bagaimana gagalnya pertemuan WTO di Cancun merupakan sebuah kemenangan tersendiri bagi gerakan rakyat dunia, WTO telah membunuh petani. Agenda-agenda terdekat adalah konsolidasi dengan berbagai organisasi seperti buruh/migran, mahasiswa, pemuda serta organisasi non pemerintah.

Jalan yang harus dilaksanakan

Tejo menyatakan, "Janji akan terjadinya pengurangan kemiskinan adalah akal-akalan dan tipuan besar di dunia, yang sangat jauh dari kenyataan. Sebelum kesepakatan liberalisasi yang diatur dalam WTO dilaksanakan saja telah banyak penderitaan yang kini tengah dihadapi oleh jutaan umat manusia di dunia". Pengurangan tarif impor adalah contoh yang sangat jelas terlihat akibatnya dimana banyak petani menderita kerugian dan jatuh dalam kemiskinan. Sehingga semakin banyak petani yang kehilangan lahannya karena harus dijual untuk menutup hutang-hutangnya. Kondisi ini tentu saja tidak sesuai dengan harapan bagi tercapainya pengurangan kemiskinan, katanya lagi.

Karena asas dan tujuan yang diinginkan oleh WTO adalah 'monopoli', liberalisasi perdagangan, dan patent atas mahluk hidup maka kesepakatan WTO telah mengarah kepada penjajahan secara lebih luas di dunia. Kondisi semacam ini tentu tidak dapat kita terima dan kita harus berjuang agar jalan lain yang menjamin kesejahteraan petani di seluruh dunia yang bisa dicapai. Beberapa langkah yang selama ini kita perjuangkan adalah pertama, reforma agraria, kedaulatan pangan, pemenuhan dan penegakkan hak asasi petani, dan membuat pasar-pasar alternatif yang sesuai dengan kaidah-kaidah perjuangan kaum tani.(ay)

Membangun Kedaulatan Pangan Di Daerah Bencana

Kedaulatan Pangan adalah suatu hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memiliki kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok pangan secara mandiri. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa dan rakyat untuk dapat mempunyai hak dalam menentukan makanan yang dipilihnya dan kebijakan pertanian yang dijalkannya. Dalam upaya menciptakan kedaulatan pangan menuju kepada keamanan pangan yang sejati, pelaksanaan kebijakan pertanian di Aceh haruslah melaksanakan kebijakan kebijakan yang mempromosikan keberlanjutan, berlandaskan pada produksi pertanian keluarga.

Iring-iringan truk tronton yang mengangkut bantuan bahan makanan bagi korban tsunami di Aceh tampak memenuhi jalan menuju Banda Aceh. Ini menjadi pemandangan sehari-hari pasca tsunami di sepanjang jalan Medan Banda Aceh. Sebuah spanduk putih panjang dipasang di sisi kiri dan kanan truk tersebut bertuliskan bantuan pangan untuk korban bencana alam di Aceh dan Sumatra Utara dari sebuah lembaga internasional.

Puluhan truk lalu-lalang setiap harinya masuk ke Aceh membawa bahan makanan untuk dibagikan kepada korban tsunami. Di pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Sabang juga terjadi aktivitas yang sama. Ratusan ton bahan makanan diturunkan dari kapal kemudian di distribusikan ke wilayah bencana. Bisa kita bayangkan berapa ribu ton bahan pangan bantuan dari luar yang didistribusikan kepada masyarakat korban bencana.

Berbagai bantuan bahan makanan juga berdatangan dari lembaga internasional lainnya. Seperti bantuan pangan FAO melalui program pangan dunia (WFP). Untuk di Sumatera Utara, World food programme

(WFP) akan mengirimkan 300 ton makanan ke Nias. Bantuan pangan yang akan dikirim tersebut meliputi 200 ton beras, 50 ton ikan, 40 ton biscuit serta 10 ton minyak goreng. Untuk Kabupaten Simeulue, WFP telah membantu 18.000 orang korban tsunami dengan persediaan stok pangan sekitar 200 ton.

Sementara itu di Banda Aceh stock beras yang berada di gudang Pemda/dolog dan gudang WFP sebanyak 29.951 ton. WFP kini memiliki cadangan bahan makanan yang cukup untuk digunakan bagi korban bencana gempa bumi tersebut. Sebelumnya WFP telah mendistribusikan batuan pangan bagi 24.000 orang yang selamat dari bencana tsunami 26 Desember 2005 di Nias dan Simeulue.

Bantuan yang "menjebak" Akan Tetapi baru-baru ini ditemukan bahwa beras bantuan kemanusiaan dari Program Pangan Dunia (WFP) sebanyak 25.241 ton yang masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi dengan izin khusus dari Menteri Perdagangan (Menperdag). Izin khusus ini diperlukan karena Indonesia masih menerapkan larangan pemasukan impor beras hingga 30 Juni 2005. Beras tersebut masuk melalui Pelabuhan Belawan Medan sebanyak 17.731 ton, melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sebanyak 4.510 ton dan 3.000 ton melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Seharusnya setiap beras impor beras yang masuk ke Indonesia harus dilengkapi dengan izin khusus dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan surat edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 71/MPP/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 mengenai larangan impor beras tahun 2005. Selain itu juga untuk melakukan kembali pemulihan di Aceh, pemerintah kembali mendapat pinjaman dari negara-negara donor yang tergabung dalam CGI (Consultative Group on Indonesia). Pinjaman tersebut

PEMBAHARUAN TANI



Beras Impor, yang dibagikan kepada korban tsunami melalui World Food Programme (WFP)

diperkirakan akan mulai cair pada Maret 2005. Para negara donor CGI akan memberikan pinjaman sebesar 1,7 miliar dolar AS.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kita terhadap niat baik para pemberi bantuan tersebut, sebagai bangsa yang berdaulat kita harus tetap waspada. Bantuan pinjaman yang diberikan oleh negara-negara donor tersebut semakin menambah hutang negara semakin besar. Bantuan pangan dari WFP yang masuk ke Indonesia tanpa izin tersebut juga menjadi tanda tanya besar bagi kita, ada niat apa sebenarnya dibalik bantuan kemanusiaan tersebut. Sementara itu mereka juga tidak menyebutkan dari mana pangan itu berasal dan apakah mengandung GMO atau tidak.

Kita harus tetap bersikap kritis terhadap paket-paket bantuan yang diberikan oleh lembaga-lembaga internasional tersebut, terutama lembaga-lembaga yang mengusung agenda neoliberalisme. Kita harus menolak bantuan pangan yang mengandung GMO dari World Food Program (WFP) dan donor-donor yang lain terutama bantuan pangan yang hanya akan merusak harga hasil pertanian di dalam negeri dan merugikan petani, termasuk juga pihak-pihak yang membagikan bibit kepada petani yang tidak jelas asal usulnya.

Bantuan pangan yang diberikan jangan sampai membuat masyarakat Aceh menjadi ketergantungan pada bantuan pangan dari luar. Dengan kata lain, masyarakat Aceh harus dibuat berdaya dalam pemenuhan kebutuhan pangan mereka sendiri untuk menciptakan kedaulatan pangan di Aceh pasca tsunami.

Untuk membangun kembali kehidupan masyarakat petani dan nelayan pasca tsunami di Aceh, pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip

kedaulatan dan masa depan korban yang kebanyakan petani dan nelayan kecil dengan adanya jaminan akses masyarakat terhadap lahan pertanian dan daerah pantai milik mereka yang menjadi penyangga hidup selama ini. Pemerintah Indonesia hendaknya tidak menerima bantuan yang menyertakan syarat yang akan menyulitkan Indonesia dan menimbulkan hutang negara semakin besar.

Rehabilitasi daerah pertanian hanya untuk memperbaiki infrastruktur pertanian yang rusak akibat tsunami dan bukan memindahkan lahan pertanian milik masyarakat kedaerah lain atau yang lebih parah lagi menggantikan lahan tanaman milik petani menjadi tanaman perkebunan dengan alasan tidak layak untuk ditanami kembali. Menurut data yang dikumpulkan KSKBA, di beberapa daerah pesisir pantai yang terkena tsunami, lahan pertanian masih bisa ditanami kembali bahkan beberapa tanaman bertambah subur. Ini jelas suatu bukti bahwa lahan pertanian tersebut masih bisa menghasilkan dan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memindahkannya atau menggantikannya dengan lahan perkebunan.

Jaminan atas pertanian Pemerintah harus memberikan jaminan terhadap hak-hak petani dan nelayan dalam mengelola lahan pertanian dan pantai serta membangun rumah-rumah mereka kembali sehingga tidak dikuasai oleh agen neoliberalisme yang masuk melalui kedok bantuan kemanusiaan. Kedaulatan pangan harus menjadi jaminan utama sehingga masyarakat Aceh tidak menerima makanan yang tidak aman maupun yang mengandung GMO dan memprioritaskan bantuan dari produk-produk pangan lokal. (tz)



KSKBA

Wawancara Ridwan G. Munte :

“Gerakan Kemanusiaan Untuk Aceh dan Sumut”

Bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang meluluh lantakkan Aceh dan Sebagian Sumatera Utara 26 Desember 2004 yang lalu telah menelan korban ratusan ribu orang. Kota Banda Aceh yang pada awalnya berpenduduk 243.000 jiwa sebelum bencana terjadi sekarang hanya tersisa sekitar 147.000 jiwa. Kerusakan infrastruktur seperti jalan yang terputus menyebabkan bantuan menjadi terhambat sampai ke tangan orang-orang yang selamat. Selain NAD sebagian Sumatera Utara gelombang tsunami juga melanda sebelas negara asia lainnya seperti, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka, Burma, sebagian negara di Africa dan lain-lain. Seluruh dunia berkabung atas bencana terbesar ini, Gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara telah menimbulkan rasa solidaritas di seluruh dunia.

Satu hari setelah bencana gempa bumi dan gelombang tsunami terjadi, FSPI dan beberapa organisasi massa dan NGO lainnya membentuk Koalisi Solideritas Kemanusiaan Bencan Alam Aceh-Sumatera Utara (KSKBA). Untuk mengetahui lebih lanjut tentang KSKBA dan kerja-kerja yang dilakukannya, Pembaruan Tani melakukan wawancara dengan Koordinator Nasional KSKBA, Ridwan G. Munte (Iwan). Berikut petikan wawancara yang dilakukan PEMBARUAN TANI (PeTani), diwakili oleh Tita Zen dan Achmad Ya'kub.



Ridwan G. Munte, Koordinator Nasional KSKBA

PeTani
Apa dan bagaimana sebenarnya KSKBA itu?

Iwan
KSKBA adalah koalisi dari beberapa organisasi untuk membantu korban bencana alam di Aceh dan sebagian Sumatera Utara. KSKBA adalah wadah koordinasi bantuan diantara sesama anggota koalisi dan kerjasama dengan wadah lainnya yang sudah ada. KSKBA bersifat terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung atas dasar solidaritas sosial dan kemanusiaan. KSKBA terbentuk pada tanggal 27 Desember, SINTESA bersama FSPI melakukan penggalangan solidaritas kemanusiaan di Sumatera Utara, sehingga pada hari itu juga tanggal 27 Desember 2004, terbentuklah Koalisi Solidaritas Kemanusiaan Bencana Alam Aceh-Sumatera Utara (KSKBA). Pada awalnya anggota koalisi ini berjumlah 6 organisasi (yaitu SINTESA, FSPI, LENTERA, SBSU, SPSU, dan JALA), yang sebelum terjadi Tsunami merupakan aliansi rakyat sipil bernama ALIANSI RAKYAT MISKIN dan ALIANSI PENDUKUNG RAKYAT MISKIN. Tapi pada perkembangan selanjutnya hingga tanggal 1

Februari 2005 anggotanya berkembang menjadi 24 organisasi baik LSM maupun ORMAS.

Dengan kondisi dan kapasitas terbatas tersebut, bencana gempa dan Tsunami ini sangat berat ditanggulangi karena miskinnya pengalaman, keahlian, dan sumber daya yang dimiliki dibandingkan pula dengan besarnya bencana yang dihadapi. Hal ini penting untuk diutarakan sebab pada hari-hari berikutnya, KSKBA harus bergerak ditengah keterbatasan kapasitas dan kepiluan hati. Walaupun demikian, KSKBA mencoba sedaya-upaya menghadapi dan memberikan kontribusi dan solidaritas kemanusiaan.

PeTani
Tindakan pertama apa yang dilakukan oleh KSKBA terhadap korban bencana di Aceh dan Sumatera Utara ?

Iwan
Pada tanggal 27 Desember 2004 kita belum bisa mendatangi lokasi bencana baik yang diaceh maupun di Nias. KSKBA berupaya mengirimkan tim ke daerah bencana tapi tim baru bisa berangkat pada tanggal 29 Desember. Berangkat tim ke

Banda Aceh, tanggal 1 berangkat tim ke Meulaboh. Pertama berangkat sebanyak dua orang tim untuk melakukan untuk melihat secara langsung kondisi korban bencana khususnya di Banda Aceh dan memetakan secara langsung lokasi pengungsian. Mengidentifikasi kebutuhan mendesak para korban dan mendokumentasikan kondisi lapangan.

PeTani
Kapan KSKBA mulai mendistribusikan bantuan ?

Iwan
KSKBA baru bisa mendistribusikan makanan pada tanggal 4 Januari 2005 dengan menggunakan truk. Pada saat itu kita kesulitan mendapatkan truk karena mahal. Nah..dari situlah kita mulai rutin mendistribusikan bahan makanan

PeTani
Bagaimana prinsip KSKBA dalam mendistribusikan bahan pangan tersebut ?

Iwan
Pada tanggal 4 Desember 2005 kita mendistribusikan beras lokal yang organik dari Sumatera Utara dan Aceh Timur. Prinsip yang

dikembangkan oleh KSKBA adalah makanan yang didistribusikan itu adalah makanan lokal dan diutamakan bahan organik. Pakaian bekas yang kita terima dari sumbangan masyarakat tidak langsung kita distibusikan begitu saja tapi kita pilih lagi mana yang masih layak untuk didistribusikan.

PeTani
Bagaimana dengan tim medis ?

Iwan
Mengenai medis kita memutuskan tidak akan mendistribusikan obat-obatan kalau tidak sekaligus dengan tim medis. Karena kita khawatir terjadi penyalahgunaan terhadap obat tersebut. Pengalaman kita pada tanggal 29 Desember itu obat yang kita bawa adalah obat-obatan yang banyak dipasaran, tapi kita capek melatih satu orang persatu posko untuk penggunaan obat itu karena orang semua lagi panic. Kita bekerja sama dengan lembaga di Malyasia KOMAS sebagai jaringan anggota KSKBA, Sintesa, dalam hal penyediaan obat dan tim medis. Kita secara regular terus mengirimkan tim medis dari Malaysia sebanyak lima sampai enam orang yang melakukan pengobatan dilapangan, itu kita



Siapa saja anggota KSKBA?

Koalisi ini terdiri dari Permata (Banda Aceh), Yayasan Biduk Alam (Langsa), Yayasan Sintesa (Medan), Yayasan Lentera (Medan), SPSU (Medan), Yayasan Kolektif (Medan), JALA (Medan), Yayasan rakyat Mandiri (Medan), Bulan Sabit Merah (Medan), SBSU (Medan), FPPI (Medan), P3MN (Medan), GMNI (Medan), HMI (Medan) Yayasan Peran (Kisaran), SMA (Kisaran), Koinonea Farming (Pematang Siantar), Insan Tani (Tapanuli Selatan), PUSDIKLAT Alam Tani (Asahan), SPSS (Palembang) PBR (Palembang). Selain FSPI sendiri, Koalisi ini juga didukung oleh satu jaringan kerja nasional dan regional: INSIST (Jogyakarta) dan South East Asia Popular Communication Programmes (SEAPCP), berkedudukan di Jakarta dan Kuala Lumpur

mulai dari Bulan Januari Maret 2005. Kita memang cukup banyak mendapatkan obat, obat yang tersisa kita distribusikan ke Nias.

PeTani
Bagaimana tahapan bantuan yang dilakukan oleh KSKBA ?

Iwan
KSKBA menetapkan tiga tahapan bantuan. Pertama tahap emergency dengan focus pekerjaannya adalah memobilisasi dan mendistribusikan bantuan. Untuk selanjutnya kita lebih mengutamakan pakaian yang baru untuk perempuan, terutama pakaian anak sekolah dan pakaian dalam perempuan. Emergensi ini awalnya kita tetapkan hanya selama tiga bulan, tapi kemudian kita rapat lagi dengan anggota KSKBA diperpanjang menjadi enam bulan dari bulan Januari Juni. Tapi ditengah emergensi ada kita buat tahap transisi dari bulan April sampai bulan Juni itu tahapan emergensi transisi dan menuju rekonstruksi. Pekerjaan pada tahap transisi selain melakukan pekerjaan emergensi itu mulai melakukan assessment lapangan untuk mendapatkan data yang lengkap tentang dampak bencana. Kemudian melakukan assessment terhadap kebutuhan korban bencana. Misalnya kita melakukan diskusi dengan para korban soal bagaimana bentuk rumah yang mereka inginkan, kemudian dimana akan dibangun, bagaimana bentuknya dll. Setelah itu kita baru melakukan kerja-kerja pengorganisasian terhadap korban bencana karena kerja-kerja rekonstruksi dan rehabilitasi nanti mereka yang akan

mengerjakannya. Misalnya ketika kita akan melakukan tahap rekonstruksi itu akan ada panitia pembangunan rumah. Jadi setiap 25 rumah itu ada satu kepanitiaan.

PeTani
Kita ketahui banyak sekali NGO, tentara dan orang asing yang masuk ke Aceh pada saat sekarang ini ? Bagaimana KSKBA menggalang solidaritas internasional ?

Iwan
Pada minggu pertama bencana bisa dikatakan semua orang boleh dengan bebas masuk ke Aceh dengan tema-tema kemanusiaan yang mereka usung. Strategi yang kita bangun di KSKBA yang pertama adalah semua anggota koalisi di dorong oleh KSKBA untuk bekerjasama dengan jaringannya. Misalnya FSPI didorong untuk menggalang solidaritas dari jaringannya misalnya dari Via Campesina. Karena prinsip KSKBA itu adalah KSKBA tidak boleh berhubungan langsung dengan donator karena kalau KSKBA berhubungan langsung dengan donator maka akan dibebankan kerja-kerja administrative seperti membuat laporan. Sementara KSKBA itu adalah organisasi emergensinya koalisi ini. Karena dari 22 anggota koalisi itu tidak ada satupun yang punya pengalaman kerja-kerja emergensi. itu lah salah satu alasan kenapa dibuat KSKBA. Berapapun yang diberi oleh anggota koalisi itulah yang dihimpun jadi tidak ada laporannya. Laporan KSKBA itu hanya akan ada sekali pada akhir bulan Juni di media massa.

PeTani
Peran organisasi tani anggota FSPI disana bagaimana?

Iwan
SPSU sebagai anggota FSPI sangat besar perannya dalam memobilisasi bahan makanan pada tahap emergensi. sementara di Aceh Permata yang menjadi organisasi yang menjadi korban tsunami. Dari 64 desa pertama ada 21 desa yang menjadi wilayah bencana. Meskipun permata menjadi korban tapi sejak bulan februari posko distribusi bantuan di Banda Aceh sudah dikelola oleh PERMATA.

PeTani
Bagaimana dengan situasi pertanian?

Iwan
Sudah mulai ada pihak lain yang membagi-bagikan bibit, kita memang sangat khawatir jangan-jangan bibit itu mengandung GMO. FAO juga sudah masuk dengan WFP.

PeTani
Bagaimana konsep membangun areal pertanian di Aceh pasca tsunami ?

Iwan
Sebagian besar sawah yang terkena bencana itu masih bisa ditanami padi. Kalau rehabilitasi lahan sawah itu lebih kepada sawahnya misalnya tanggul, irigasi, bukan merehabilitasi tanah yang tidak cocok lagi. Paling-paling hanya membuang sampah yang ada. Di Pantai Timur itu rata-rata areal persawahan sudah bisa ditanami kembali. Dan menurut orang-orang kampung itu padi sisa tanaman itu malah tumbuh subur. Itu mungkin unsure hara yang ada dilaut itu terbawa kedarat dan setelah beberapa minggu setelah tsunami ada hujan yang sangat lebat. Diduga itu juga membersihkan unsure garam yang tinggi. Sehingga sawah bisa kembali ditanami. Sawah itu hanya didaerah pantai sedangkan daerah yang bukan pantai tidak rusak. Masih banyak pangan didaerah lain. Makanya tidak ada alasan karena tsunami tidak cukup lagi makanan di Aceh. Dan tidak ada alasan mendatangkan pangan dari luar untuk Aceh.

PeTani
Bagaimana dengan kehidupan nelayan yang terkena tsunami ?

Iwan
Permintaan mereka yang nelayan tetap nelayan, walaupun harus pindah lokasi jangan terlalu jauh dari pantai karena mereka akan tetap jadi nelayan, walaupun kehilangan desa tetapi masih ada tanahnya. Pada prinsipnya mereka tetap menjadi nelayan karena mereka tidak punya kemampuan menjadi petani itu menjadi persoalan. Kalau membangun rumah terlalu jauh dari pantai maka akan menyulitkan mereka.

PeTani
Bagaimana dukungan KSKBA terhadap petani dan nelayan perempuan ?

Iwan
Kita melakukan dukungan ekonomi perempuan baik kepada petani maupun nelayan. Perempuan yang diutamakan adalah perempuan yang kehilangan mata pencarian dan keluarga, itu yang dihimpun menjadi kelompok dikampung. Unit usaha apa yang akan mereka kerjakan itu yang akan dijawab melalui assessment. Pernah kita terbayang untuk perempuan nelayan itu membuat usaha bersama pengeringan ikan asin, koperasi nelayan yang menyediakan alat tangkap. Dari sisi rumah mereka akan tetap mendapat satu rumah seperti yang satu keluarga karena dia adalah satu keluarga. Pendekatan kita adalah pendekatan keorganisasian, kalau petani yang belum menjadi anggota permata maka akan diorganisir menjadi anggota permata. Sementara organisasi nelayan itu akan diorganisir menjadi organisasi nelayan.

Kepada organisasi dan individu yang sejalan dengan kita diharapkan terus memobilisasi bantuan kepada kawan-kawan kita yang terkena bencana ini. ■



**BANTU SAUDARA
KITA YANG DILANDA
TSUNAMI!**

**salurkan bantuan
anda melalui:**

Bantuan Dalam Bentuk Mata Uang
Rupiah (Indonesia)
Bank Mandiri
No. Rekening : 105-00-045 7243-8
Kantor Cabang Medan Zaenul Arifin
Behalf; Edy Suhartono & M. Haris Putra

Any aids in foreign currency (not
Indonesia Rupiah),
Standard Chartered Bank
Swift Bank Code : SCB LIDJ XAXXX
Address of Bank : Jl. Imam Bonjol No. 17
North Sumatera, Indonesia.
Account number : 047-1-005467-2
Name of Payee : Sintesa (Yayasan Sinar
Tani Indonesia)



www.classroomclipart.com



Perempuan dan anak-anak Aceh korban tsunami harus menjadi subjek dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi daerah bencana

Bias Jender dalam Bantuan Tsunami

Bencana gempa dan gelombang tsunami yang menerjang Aceh dan beberapa wilayah di Asia dipenghujung tahun lalu, telah menelan banyak korban. Dilihat dari sisi upaya penanggulangannya, secara umum mengabaikan kepekaan jender. Hal itu disebabkan oleh ketiadaan pengalaman dalam menangani bencana.

Perempuan dan anak-anak Akibat bencana itu, semua orang mengalaminya, tidak membedakan laki-laki atau perempuan, tua maupun muda. Namun dampaknya berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. "Mereka mendapatkan dampak yang berbeda. Soalnya, dipengaruhi oleh peran jender yang telah dilekatkan," ujar Munawiyah kepada *Pembaruan Tani*.

Peran perempuan terhadap pengelolaan dan pemeliharaan keluarga mengharuskan perempuan bereaksi cepat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakaian dan obat-obatan anggota keluarga dan kerabatnya. Kentalnya budaya patriarki tersebut menyebabkan kaum perempuan tetap harus melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik, meskipun keadaan dan kondisinya tidak lebih ringan dari korban yang laki-laki.

Dengan tanggung jawab seperti ini, perempuan mendapatkan beban yang lebih berat, terutama pada situasi paska bencana, ditambah lagi sulitnya mengakses sumber daya yang tersedia. Di berbagai lokasi pengungsian, perempuan harus berebut untuk mendapatkan makanan dan air

bersih dengan laki-laki yang secara fisik lebih mempunyai akses.

Dari tayangan berita televisi, bisa disaksikan sewaktu pesawat relawan asing memberikan bantuan dari helikopter, perempuan harus ikut berebut dengan sekumpulan laki-laki. Sedangkan yang tidak berani hanya mampu melihat bantuan tersebut dari jauh.

Dalam situasi bencana, perhatian secara khusus harus diberikan kepada anak-anak dan perempuan. Karena, telah terjadi labelisasi persepsi masyarakat bahwa bila terjadi bencana peran perempuan lebih kepada kerja perawatan dan pemeliharaan. Dengan pelabelan seperti itu, sangatlah mungkin apabila anak-anak perempuan tidak bisa kembali ke sekolah karena harus membantu ibunya ditempat pengungsian.

Disamping itu, apabila keluarga mengalami keterbatasan kemampuan biaya, yang menjadi prioritas selalu saja saudara mereka yang laki-lakinya. Hal ini bukan suatu yang tidak mungkin, mengingat pendidikan di Indonesia lebih mengutamakan

anak laki-laki. Ini tergambar jelas dari data statistik yang dikeluarkan BPS 96/97, lebih 6,9 juta penduduk buta aksara, 1 juta lebih di perkotaan selebihnya ada di pedesaan, 67 % dari jumlah itu 67 % adalah perempuan.

Penanganan bencana untuk perempuan dan anak

Dalam penanganan bencana, sangat penting untuk memberikan perhatian yang lebih khusus terhadap anak dan perempuan. Dengan tidak mengurangi rasa simpati terhadap besarnya bantuan masyarakat yang mengalir ke Aceh dan Nias, bantuan tersebut ternyata tidak memperhatikan kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak, seperti pakaian bayi, pembalut wanita dan pakaian dalam.

Selama ini, terutama pada tahap tanggap darurat, bantuan yang dikirim belum memikirkan kebutuhan khusus perempuan dan anak. Baru setelah beberapa minggu, mulai ada yang mengirimkan bantuan pakaian bayi, susu, makanan bayi, selimut, pembalut wanita, pakaian dalam, mukenah, baju muslim dan pakaian ibu hamil. Ini menunjukkan tingkat peka jender masyarakat kita masih sangat rendah.

Dilihat dari sisi medis, sangatlah penting untuk memberikan penanganan khusus terhadap perempuan. Pasalnya, ada kesungkapan pada diri perempuan untuk menceritakan penderitaan fisik yang mereka alami terutama pada bagian tubuh yang sangat pribadi terhadap relawan laki-laki, karena para relawan yang dikirim sebagian besar adalah laki-laki.

Tim relawan medis dari Koalisi Solidaritas Kemanusiaan Untuk Bencana Alam (KSKBA)

melaporkan, hampir 80% pengungsi, sebagian besar perempuan dan anak, mengalami gangguan pernapasan dan diare. Mereka juga menambahkan, bahwa penting untuk memberikan konseling khusus bagi perempuan dan anak dalam menangani trauma yang paska bencana.

Sebagaimana telah diketahui, daerah yang terkena dampak tsunami paling berat adalah daerah pantai dan sebagian daerah pertanian. Di daerah tersebut, penanganan yang dilakukan baik tahap darurat rehabilitasi maupun relokasi seharusnya berdasarkan kepada kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat korban sendiri, khususnya perempuan dan anak.

Petani perempuan

KSKBA sendiri menyatakan, sejak awal pengiriman bantuan

Tim relawan medis dari Koalisi Solidaritas Kemanusiaan Untuk Bencana Alam (KSKBA) melaporkan, hampir 80% pengungsi, sebagian besar perempuan dan anak, mengalami gangguan pernapasan dan diare. Mereka juga menambahkan, bahwa penting untuk memberikan konseling khusus bagi perempuan dan anak dalam menangani trauma pasca bencana

selalu menyertakan kepentingan perempuan dan anak. Mereka sangat menekankan bahwa makanan yang dikirimkan adalah makanan yang layak untuk dikonsumsi. "Jangan sampai karena dalam kondisi bencana lantas makanan yang kita kirimkan merupakan makanan yang sudah hampir kadaluarsa, makanan instant atau lebih buruk lagi manakan

yang mengandung GMO (pangan transgenik-red)," kata Ridwan Munte, koordinator KSKBA.

Menurut dia, setelah masa tanggap darurat selesai, program khusus KSKBA terhadap perempuan adalah melakukan dukungan ekonomi perempuan baik kepada petani maupun nelayan yang kehilangan mata pencarian dan keluarga, dalam bentuk kelompok di kampung.

Ridwan memaparkan, salah satu yang unit usaha telah di-assessment oleh kelompok diantaranya, pengeringan ikan asin dan koperasi nelayan yang menyediakan alat tangkap. Pendekatan yang akan dilakukan merupakan pendekatan keorganisasian.

KSKBA akan mengoptimalkan peran Persatuan Masyarakat Tani Aceh (Permata), sebuah organisasi petani di Aceh. "Nantinya bagi petani yang belum menjadi anggota, di organisir menjadi anggota. Sementara untuk nelayan akan diorganisir menjadi organisasi nelayan," demikian kata Ridwan. (wit)

Data : PAN AP	
Total populasi di Aceh	Sekitar 4 juta jiwa
Korban terbunuh selama 25 tahun perang saudara	Sekitar 20.000 jiwa
Korban meninggal dan hilang oleh tsunami	Sekitar 230.000 jiwa
Orang mengungsi karena bencana tsunami	Sekitar 700.000 jiwa
Perempuan di pengungsian	60%



Biodigester: Sumber Energi dari Kotoran Ternak

PEMBARUAN TANI

Biodigester merupakan salah satu teknologi tepat guna yang memanfaatkan limbah kotoran sebagai bahan baku utamanya. Di dalam tabung biodigester yang tertutup rapat, limbah tersebut di fermentasikan sehingga menghasilkan gas bio untuk keperluan rumah tangga. Selain itu juga fermentasi yang dilakukan akan meningkatkan kandungan bahan penyubur dari limbah sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman dan rumput makanan ternak secara teratur dan tetap. Menggunakan Biodigester merupakan sebuah cara yang sangat menguntungkan, karena mampu memanfaatkan alam tanpa merusaknya.

Di daerah pedesaan limbah kotoran ternak masih belum dimanfaatkan secara optimal. Petani biasanya hanya memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk kandang untuk tanaman pertanian, padahal selain untuk pupuk limbah tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku penghasil energi. Dari limbah kotoran yang tidak berharga bisa tercipta suatu teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk keperluan rumah tangga petani.

Tidak bisa disangkal bahwa penggunaan teknologi akan memudahkan kita untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Akan tetapi teknologi yang kita gunakan harus teknologi yang bisa memanfaatkan secara optimal dan serasi dengan sumber daya yang tersedia di lingkungan kita sehingga mendorong untuk terus berkreaitivitas. Bentuk teknologi tepat guna sangat beragam, namun dari beragam teknologi tepat guna ada teknologi yang memiliki manfaat ganda yaitu teknologi biodigester. Dengan konstruksi yang sederhana sehingga pembuatannya tidak membutuhkan seorang ahli, akan tetapi tetap diperlukan pengetahuan teknologi yang mendalam untuk perencanaan dan menjalankan.

Biodigester merupakan salah satu teknologi tepat guna yang memanfaatkan limbah kotoran sebagai bahan baku utamanya. Di dalam tabung biodigester yang tertutup rapat, limbah tersebut di fermentasikan sehingga menghasilkan gas bio untuk keperluan rumah tangga. Selain itu juga

fermentasi yang dilakukan akan meningkatkan kandungan bahan penyubur dari limbah sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman dan rumput makanan ternak secara teratur dan tetap. Menggunakan Biodigester merupakan sebuah cara yang sangat menguntungkan, karena mampu memanfaatkan alam tanpa merusaknya.

Jumlah hewan ternak yang banyak di daerah pedesaan merupakan potensi untuk mengembangkan biodigester. Dengan memanfaatkan kotoran hewan ternak, kotoran manusia, maupun limbah organik lainnya baik dari industri maupun rumah tangga, biodigester mampu memenuhi kebutuhan energi rumah tangga, tidak hanya untuk kebutuhan memasak tetapi juga untuk penerangan dan menjalankan mesin.

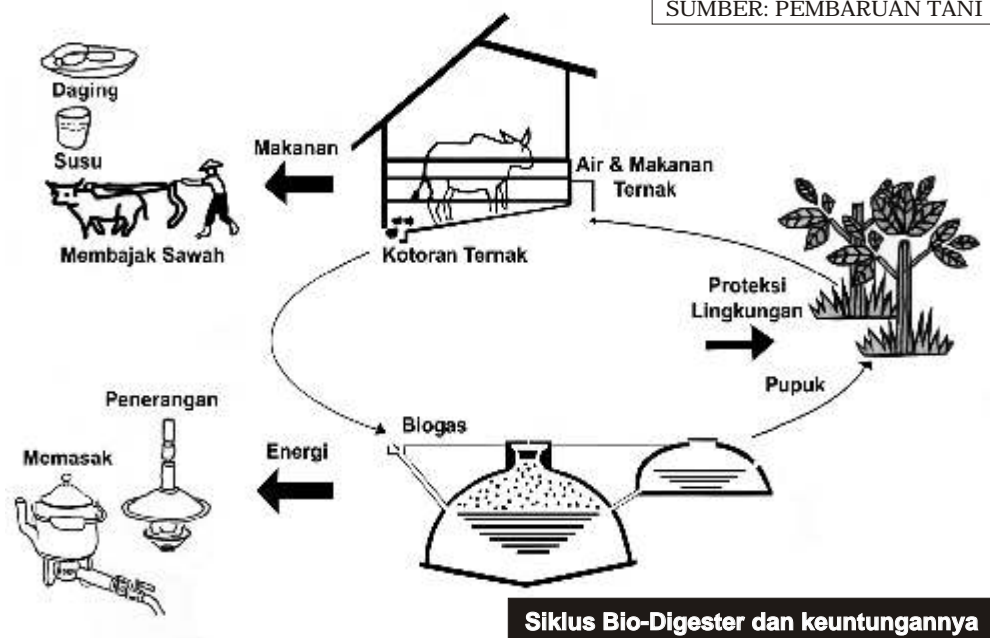
Penggunaan Biodigester akan menghasilkan manfaat ganda bagi keluarga petani. Dari hasil berternak petani akan memperoleh produksi susu dan daging yang bisa dikonsumsi atau dijual. Kotorannya dimanfaatkan untuk bahan biodigester yang akan menghasilkan gas bio untuk keperluan memasak dan lampu penerangan, sehingga bisa menghemat pengeluaran rumah tangga untuk membeli kayu bakar atau minyak tanah. Selain keuntungan diatas, hasil fermentasi biodigester akan menghasilkan pupuk organik yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman sayuran dan buah-buahan.

Untuk membuat sebuah biodigester tergantung dari jumlah sapi atau ternak lainnya sebagai penyedia bahan dasar. Makin besar ukurannya maka akan semakin besar gas yang dihasilkan dan semakin banyak kotoran yang dibutuhkan. Ukuran yang paling umum adalah 9M³ yang dapat menyediakan gas untuk memasak dan penerangan rumah tangga. Penggunaan biodigester tidak ada keterbatasan. Selain untuk keperluan rumah tangga, biodigester juga bisa dipergunakan untuk berbagai kebutuhan lain, misalnya

untuk penetas ayam, pemanas radiator, penggoreng kopi, pembakar roti atau sterilisasi alat-alat medis.

Biaya yang dibutuhkan untuk membangun biogas tergantung dari besar ukuran. Bangunan Biogas memang memerlukan banyak modal, karena akan dapat dioperasikan selama bertahun-tahun. Untuk penghematan biaya sebuah biogas ukuran 9M³ bisa di pergunakan untuk kebutuhan 4 rumah tangga, sehingga biayanya bisa di tanggulangi

SUMBER: PEMBARUAN TANI



Siklus Bio-Digester dan keuntungannya

secara bersama-sama.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan Biodigester adalah mencakup kondisi yang perlu diciptakan agar dapat menghasilkan gas dan dapat dipergunakan. Beberapa hal tersebut antara lain adalah bahan dasar yang terdiri bahan organik dan air, sebuah wadah yang tertutup rapat (udara tidak bisa masuk), suhu pengolahan berkisar antara 15° C dan 35° C dan waktu penyimpanan lebih dari 30 hari, agar bakteri-bakteri sempat memproduksi biogas. Selain itu posisi Biodigester sebaiknya jauh dari pohon-pohonan, agar akarnya tidak merambat tumbuh kedalam biodigester.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pembuatan dan pemanfaatan biodigester, pembaca Tabloid Pembaruan Tani dapat menghubungi Yayasan Sintesa yang telah membuat unit percontohan dan pengembangan biodigester di Diklat Alam Tani Sumatera Utara. (tz)

Petani NTB Tolak Pembangunan Bandara Internasional

Demi mengembangkan pariwisata, Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) menggusur lahan petani untuk membangun sebuah bandar udara berkelas internasional. Rencana tersebut telah menimbulkan malapetaka besar bagi petani pemilik tanah tempat Bandara Internasional akan berdiri. Proses pembebasan tanah yang dilakukan penuh dengan kecurangan disertai dengan intimidasi, baik oleh aparat berseragam dan tidak berseragam maupun dari pemerintah daerah sendiri.

Pemerintah NTB beralasan tindakan tersebut didasarkan pada Perda No. 9 Tahun 1989 tentang Pembangunan Kawasan Pariwisata, yang dikeluarkan semasa Gubernur Warsito. Perda tersebut membuat titik berat pembangunan NTB berubah dari sektor pertanian menjadi sektor pariwisata.

Dalam pelaksanaan pembebasan lahan untuk bandara tersebut, masyarakat merasa diperlakukan semena-mena. "Pembebasan lahan untuk bandara internasional di Penujak ini penuh dengan tekanan. Kami sebenarnya enggan pindah dan menjual rumah dan lahan kami dengan harga murah, tetapi karena ada intimidasi, ya terpaksa," ujar Mahdi anggota Serikat Tani (SERTA) NTB kepada Pembaruan Tani.



Sawah, Pengembangan pariwisata di NTB akan mengorbankan petani sehingga sawah-sawah subur seperti ini akan terus menyusut jumlahnya

Sementara itu, Sekjen SERTA NTB, Wahidjan mengatakan, Pemerintah Propinsi NTB harus melibatkan pemuka adat dan pemerintahan desa untuk membujuk masyarakat melepas lahan mereka. "Pemerintah dan para investor tak ubahnya seperti calo resmi yang melegalkan segala cara untuk menggusur rakyat. Masyarakat Tanak Awu, berkali-kali mengeluarkan pernyataan

diperjualbelikan. Tanah adalah pusaka warisan yang sudah melekat dan menyatu dengan manusia yang ada di atasnya. Pentingnya tanah bagi masyarakat Lombok dengan sendirinya melahirkan kekuatan yang mendorong mereka untuk terus mempertahankan setiap jengkal tanah dari campur tangan pihak luar. (tz/cr)

sikap melalui media cetak maupun media elektronik. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak menyadari bahwa sengketa sebenarnya bukan masyarakat yang menginginkan dan masyarakat Tanak Awu menginginkan agar sengketa ini segera diselesaikan." Ujar dia.

Bagi masyarakat Lombok tanah adalah kehidupan dan itu terlihat dalam semboyan "Tanak tolang papuk balok", yang memberikan gambaran bahwa tanah bukanlah barang komoditi yang bisa

Upaya Permata Memenuhi Pangan Pasca Tsunami

Permasalahan pangan di Aceh makin bertambah saja setelah tsunami terjadi.

Data dari Menteri Pertanian menyebutkan bahwa tsunami telah mengakibatkan 20% areal persawahan di Aceh rusak dan hal ini berdampak pada terjadinya krisis pangan pada wilayah tertentu di Aceh, mengingat tsunami telah mengakibatkan paling tidak 600.000 masyarakat Aceh kehilangan pekerjaan dan kebanyakan di bidang pertanian dan perikanan. Sementara khusus pertanian saja, lebih dari 60.000 hektar lahan pertanian musnah.

Sementara itu, di Meulaboh dan Banda Aceh, lumpuhnya pasar dan terbatasnya stok adalah masalah utama pemenuhan pangan ini, menurut Munawiyah dari Persatuan Masyarakat Tani Aceh (Permata). Di lain tempat, masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan antara Banda Aceh dan Aceh Besar merasa sangat kesulitan mendapatkan barang kebutuhan pokok, seperti beras, ikan, susu, dan gula. Beberapa pasar tradisional seperti di Ulee Kareng dan Ketapang hanya menjual sayur mayur, daging dan garam. Sedangkan beras dan barang kebutuhan pokok lainnya tidak tersedia di pasar.

Bantuan pun lalu datang, baik nasional maupun internasional. Bantuan yang berusaha untuk menangani masalah pemenuhan pangan ini pun terbentur banyak masalah. Distribusi ternyata sulit, apalagi ditambah masalah titik-titik pengungsi yang belum diatur dengan baik.

Para pengungsi di Aceh saat ini mencapai 599.506 orang yang terbagi atas, di Bireun sebanyak 35.000 orang, Aceh Timur (22.000), Aceh Utara (97.942), Banda Aceh (27.980), Lhokseumawe (11.000), Pidie (49.421), Aceh Tengah (3.454), Aceh Jaya (33.055), Meulaboh (80.251), Aceh Besar

(107.740), Simeulue (46.017), Aceh Barat (58.583), Aceh Barat Daya (13.964), Nagan Raya (13.099).

Masalah-masalah di ataslah yang menjadi sorotan Permata. Akankah subsidi pangan tersebut akan menyelesaikan problema distribusi pangan? Pemerintah dan lembaga terus-menerus mencekoki rakyat dengan subsidi, sedangkan yang dilakukan belum tentu menjadi solusi (lihat kasus beras impor dari World Food Programme yang malah menambah masalah). Di lain pihak, 600.000 rakyat Aceh yang kehilangan pekerjaan tentu tidak mau hanya berpangku tangan saja.

Ketergantungan masyarakat Aceh pada bantuan-bantuan pangan dari luar merupakan masalah terpenting yang harus dipecahkan untuk menutup kemungkinan kurangnya pangan itu sendiri. Mengingat juga masih ada sebagian besar daerah pertanian di

Aceh yang tidak terkena tsunami. Sehingga secara nyata masyarakat Aceh mampu memenuhi pangannya sendiri, hal ini diperkuat dengan panen raya yang dilakukan oleh Mentan pada Februari lalu. Dengan kata lain, masyarakat Aceh harus dibuat berdaya dalam pemenuhan kebutuhan pangan mereka sendiri untuk menciptakan kedaulatan pangan di Aceh pasca tsunami.

Keberpihakan ini harus digaungkan sebagai pemecahan masalah krisis pangan di daerah yang tersapu tsunami. Seperti yang dideklarasikan dalam konferensi regional tsunami, seharusnya petani diberi kesempatan membangun kembali pertanian mereka, tidak dialihkan ke bidang lain, dan yang paling penting tanah mereka dikembalikan dan direhabilitasi. Sehingga kedaulatan pangan yang dicita-citakan tidak menjadi wacana semata. (ay/mi)



Relawan KSKBA dan Permata, tengah berdiskusi untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban tsunami